

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Tahapan Input

4.1.1 Analisis Lingkungan Bisnis Internal

Analisis lingkungan bisnis ini dilakukan dengan beberapa alat atau *tool* yang sesuai dengan kondisi yang ada pada dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Pringsewu . Alat yang digunakan dalam menganalisis strategi bisnis organisasi adalah CSF. Untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu digunakan analisis SWOT. Untuk menganalisis proses bisnis organisasi, dapat digunakan *Value Chain*,

Dan untuk menyusun strategi sistem informasi maupun teknologi informasi penulis menggunakan metode ward and peppard, yang nantinya akan diintegrasikan dengan berbagai elemen yang ada pada pengembangan sistem informasi di Kabupaten Pringsewu, yang secara rinci akan diterapkan pada dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Pringsewu. Analisis CSF digunakan untuk mengetahui faktor penentu keberhasilan pada dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Pringsewu atau strategi layanan teknologi dan informasi pada dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Pringsewu, melalui kegiatan wawancara dan mendapatkan hasil seperti tujuan serta pemetaannya dan sasaran kerja setiap bidang yang ada di dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Pringsewu

Analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di dalam dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Pringsewu dengan melakukan berbagai kegiatan seperti wawancara, observasi, Pustaka, serta kegiatan lainnya yang akan menghasilkan luaran berupa hal hal yang menjadi kekuatan atau strength serta kelemahan atau weakness. Selanjutnya juga akan didapatkan faktor faktor yang mempengaruhi dari kekuatan maupun kelemahan tersebut. Faktor yang mempengaruhi merupakan peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) serta diformulasikan ke dalam matriks SWOT.

Kegiatan selanjutnya adalah dengan melakukan analisis terhadap value chain dari dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Pringsewu. Analisis value chain untuk menganalisis alur kerja atau proses dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Pringsewu, untuk mendapatkan analisis pelican maka peneliti melakukan kegiatan seperti wawancara maupun observasi, yang nantinya akan dibentuk sebuah Diagram yang menggambarkan proses tersebut. Hal hal yang berkaitan dengan kegiatan pelican didapatkan melalui beberapa dokumen seperti peraturan Bupati, RPJMD kabupaten Pringsewu, serta dokumen dokumen lainnya yang mendukung untuk mendapatkan hal hal yang menjadi kunci utama dari jalannya proses bisnis yang ada di dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Pringsewu.

4.1.2 Analisis CSF (Critical Success Factor)

Berdasarkan hasil wawancara dan menganalisis visi serta misi yang berhubungan fungsi yang dimiliki oleh dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Pringsewu serta dengan menganalisis dokumen yang berhubungan dengan strategi pelaksanaan fungsi dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Pringsewu maka didapatkan tujuan utama dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Pringsewu dan identifikasi CSF. Krisis ini akan menghasilkan profil dari dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Pringsewu, yang juga akan menampilkan struktur organisasi serta fungsi fungsi yang ada di dalamnya yang digunakan sebagai input utama dalam menemukan hal hal apa saja yang akan menjadi faktor faktor yang mempengaruhi kesuksesan jalannya proses bisnis yang ada di dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Pringsewu. Dari beberapa dokumen dan observasi yang dilakukan maka beberapa rincian akan disajikan melalui subtopic yang ada di bawah ini.

4.1.3 Gambaran Umum dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Pringsewu.

4.1.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas-dinas Pemerintah Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas urusan komunikasi, informatika, persandian dan statistika.

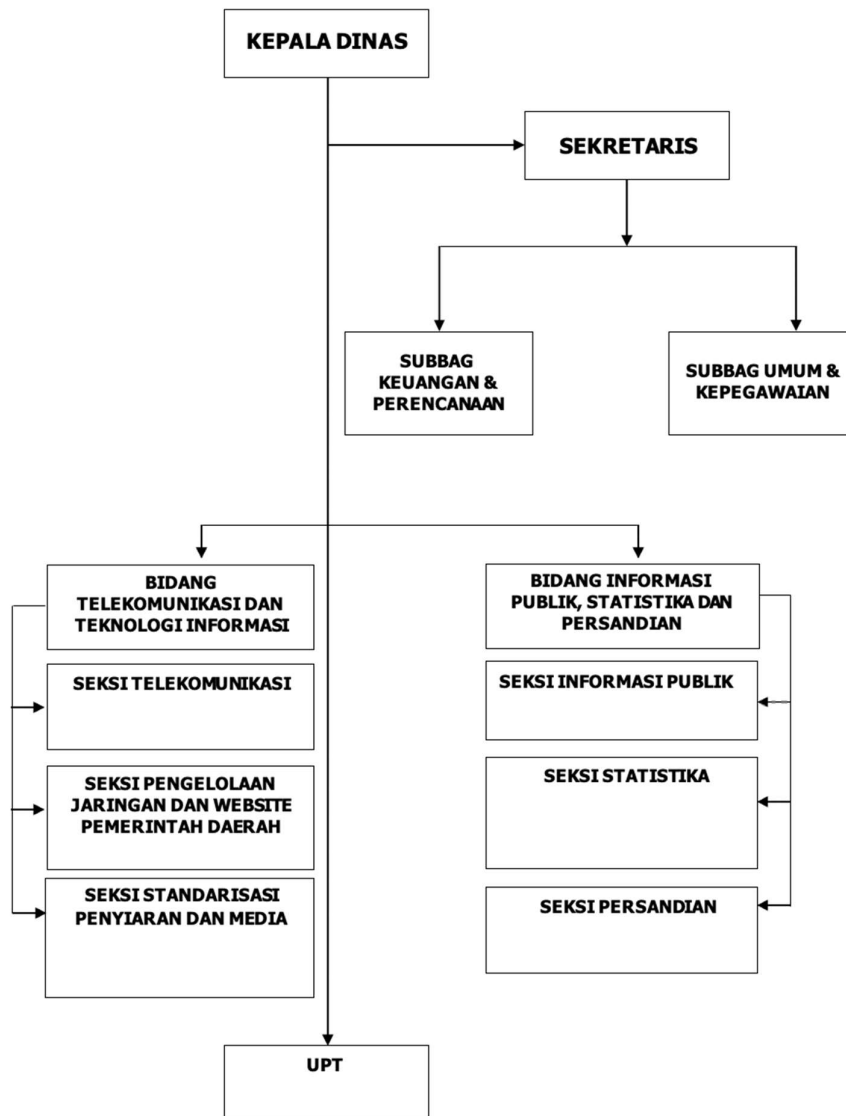
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.1.5 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu,

Susunan Organisasi Kabupaten pringsewu terdiri dari

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Subbag Perencanaan dan Keuangan
- d. Subbag Umum dan Kepegawaian
- e. Bidang Telekomunikasi dan Teknologi Informasi
- f. Bidang Informasi Publik, Statistika dan Persandian
- g. Seksi Telekomunikasi
- h. Seksi Pengelolaan Jaringan dan Situs Web Pemerintah
- i. Seksi Standarisasi Penyiaran dan Media
- j. Seksi Informasi Publik
- k. Seksi Statistik
- l. Seksi Persandian



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

1. Bidang Informasi Komunikasi Publik Dan Statistik Sektoral

Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik sektoral mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan

nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi serta pengelolaan tugas Statistik sektoral.

Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik Sektoral mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

- a. Kelompok sub-substansi Informasi Publik mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah di Kabupaten; perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Informasi Publik; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Informasi Publik; penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Informasi Publik; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Informasi Publik; menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial); menyelenggarakan layanan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat); menyelenggarakan layanan dan pengolahan aduan masyarakat; menyelenggarakan standarisasi pertukaran informasi untuk database informasi lintas sektoral; melakukan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah; melakukan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah; menyelenggarakan layanan Pengolahan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; menyelenggarakan pelayanan informasi public; pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- b. Kelompok sub-substansi Komunikasi Publik mempunyai tugas dan fungsi dalam penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi serta layanan hubungan media di lingkup pemerintah daerah; perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Komunikasi Publik; penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; pelaksanaan

monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Komunikasi Publik; menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah; menyelenggarakan layanan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal; menyelenggarakan layanan pembuatan konten lokal; menyelenggarakan layanan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal; melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah; melakukan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik; melakukan pengembangan sumber daya komunikasi publik di lingkungan kabupaten; menyelenggarakan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*); menyelenggarakan pengelolaan hubungan masyarakat dan kemitraan komunitas; pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- c. Kelompok sub-substansi Statistik Sektoral mempunyai tugas dan fungsi dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, menyusun rencana program dan kegiatan, menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis, sinkronisasi, koordinasi data dan informasi terkait pengelolaan statistik sektoral serta evaluasi pelaksanaan program statistik sektoral; perencanaan dan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis statistik sektoral; penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di statistik sektoral; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan statistik sektoral; menyusun program kerja Statistik Sektoral; menyiapkan bahan rumusan norma standar prosedur Statistik Sektoral; menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan data/informasi Statistik Sektoral; menyiapkan dan menyusun rencana program dan kegiatan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Statistik Sektoral; melaksanakan pengKajian program kerja Seksi Statistik Sektoral; melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi Statistik Sektoral; menyiapkan bahan untuk pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi data/informasi Statistik Sektoral; menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan pengelolaan data/informasi Statistik

Sektoral; menyiapkan bahan untuk penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan penyusunan standarisasi data/informasi Statistik Sektoral; menyiapkan bahan pengelolaan forum data; menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; melaksanakan kerjasama dengan BPS dan instansi lain yang terkait dengan pengumpulan data Statistik Sektoral; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Tata Kelola Spbe, Persandian Dan Keamanan Informasi

Bidang Tata Kelola SPBE, Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dan Sumber Daya SPBE, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi informatika dan layanan keamanan informasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Tata Kelola SPBE, Persandian dan Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Tata Kelola SPBE, Persandian dan Keamanan Informasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Kelola SPBE, Persandian dan Keamanan Informasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Tata Kelola SPBE;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Tata Kelola SPBE, Persandian dan Keamanan Informasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Tata Kelola SPBE, Persandian dan Keamanan Informasi;
- f. menyelenggarakan tugas-tugas lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Untuk melaksanakan fungsi, Bidang Tata Kelola SPBE, Persandian dan Keamanan

Informasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dan Sumber Daya SPBE, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi informatika dan layanan keamanan informasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dan Sumber Daya SPBE, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi informatika dan layanan keamanan informasi;
- c. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dan Sumber Daya SPBE, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi informatika dan layanan keamanan informasi;
- d. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dan Sumber Daya SPBE, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi informatika dan layanan keamanan informasi;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dan Sumber Daya SPBE, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi informatika dan layanan keamanan informasi;
- f. menyelenggarakan tugas-tugas lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Tata Kelola SPBE, Persandian dan Keamanan mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

- a. Kelompok sub-substansi Pengelolaan Infrastruktur dan Sumber Daya SPBE mempunyai tugas dan fungsi membantu fungsi layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pringsewu; perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Infrastruktur dan Sumber Daya SPBE; penyiapan

bahan perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Infrastruktur dan Sumber Daya SPBE; penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Infrastruktur dan Sumber Daya SPBE; dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengelolaan Infrastruktur dan Sumber Daya SPBE; menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC); menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi *e-Government*; menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika; menyelenggarakan layanan *Government Cloud Computing*; menyelenggarakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik; menyelenggarakan layanan filtering konten negatif; menyelenggarakan layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah; menyelenggarakan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah; menyelenggarakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan; menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik; menyelenggarakan pelayanan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif; menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-Government*; menyelenggarakan layanan koordinasi kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah; menyelenggarakan layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Kabupaten; melaksanakan pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat; pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- b. Kelompok sub-substansi Aplikasi Informatika mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Kepala Bidang Tata Kelola SPBE, Persandian dan Keamanan Informasi terkait fungsi Layanan manajemen data dan informasi *e-Government* layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik & suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart City*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di

Kabupaten Pringsewu; perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Aplikasi Informatika;penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Aplikasi Informatika; penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Aplikasi Informatika; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Aplikasi Informatika; menyelenggarakan Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan; menyelenggarakan Layanan *recovery* data dan informasi; menyelenggarakan layanan Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan; menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik; menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;menyelenggarakan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;menyelenggarakan layanan interoperabilitas; menyelenggarakan layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan;menyelenggarakan layanan Pusat *Application Programm Interface* (API) daerah; meyenggarakan layanan pengembangan *Business Process re-engineering* pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder *Smart City*); menyelenggarakan layanan Sistem Informasi *Smart City*; menyelenggarakan layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat; melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian *Smart City*; menyelenggarakan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan di Kabupaten Pringsewu; pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- c. Kelompok sub-substansi Persandian dan Keamanan Informasi mempunyai tugas dan fungsi dalam fungsi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi; perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Persandian dan Keamanan Informasi; penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Persandian dan Keamanan Informasi; penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Persandian dan Keamanan Informasi; pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Persandian dan Keamanan Informasi; melakukan perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah; menyusun peraturan teknis tata kelola persandian untuk

pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaringan komunikasi sandi; menyusun peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten; menyusun peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi; menyusun peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi; melakukan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi; melakukan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah; melakukan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah; melakukan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi; melakukan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi; meningkatkan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar; melakukan pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar; melakukan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian; melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi; melakukan penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten; melakukan penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten; merancang pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten; melakukan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra

penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya; melakukan pengamanan informasi elektronik; melakukan pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi; melaksanakan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi; melakukan penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi; melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

4.1.6 Visi, Misi dan Tujuan

VISI

Terwujudnya Komunikasi Dan Teknologi Informasi Handal

MISI

1. Meningkatkan Pelaksanaan E-Government melalui Integrasi dan Koneksitas Jaringan Informasi
2. Meningkatkan Peran Pusat Informasi, Kehumasan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat
3. Meningkatkan Pengelolaan Pos dan Telekomunikasi
4. Meningkatkan Kualitas Aparatur Komunikasi dan Informasi

4.1.7 Tugas dan Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik sektoral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik sektoral;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik sektoral;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik sektoral;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik sektoral;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik sektoral; dan
- f. menyelenggarakan tugas-tugas lain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Dinas mempunyai tupoksi:

- a. Menyusun visi misi rencana strategis (Renstra) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Dinas Komunikasi dan Informatika dengan memperhatikan visi, misi Renstra RPJMD Kabupaten Pringsewu dan kebijakan Bupati Pringsewu sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mengarahkan bawahan dalam menyusun program dan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan RPJMD Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah disusun agar pelaksanaan tugas dapat terarah dan terencana dengan baik;
- c. Membina bawahan dalam rangka pelaksanaan operasional program dan rencana Dinas berdasarkan rumus kebijakan, petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) serta peraturan Daerah (perda) yang telah ditetapkan agar tugas Dinas dapat terlaksana dengan baik;
- d. Mengkoordinir bawahan dalam merumuskan sasaran program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan visi dan misi Dinas serta kebijakan umum anggaran (KUA) Dinas untuk pedoman pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan;
- e. Merumuskan Kebijakan Umum Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika dengan memperhatikan kebijakan umum anggaran Kabupaten Pringsewu, RPJMD Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;

- f. Menyusun kebijakan teknis Dinas dengan mengamati data bidang komunikasi dan informatika dan memperhatikan kebijakan Bupati Pringsewu, RPJMD Dinas komunikasi dan informatika, kebijakan Umum anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. Mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. Mengkoordinasi hubungan kerja vertikal dan horizontal dengan instansi terkait berdasarkan kebijakan Dinas agar pelaksanaan program dapat terlaksana dengan baik;
- i. Merumuskan kebijakan dalam hal perencanaan berdasarkan peraturan yang berlaku dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Merumuskan kebijakan dalam hal pembinaan dan pemberian bimbingan kepada bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- k. Mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan pengawasan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika serta sekretariat berdasarkan peraturan yang berlaku agar tugas-tugas dapat terlaksana dengan baik;
- l. Mengendalikan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dari seluruh bidang dan sekretariat berdasarkan laporan masing-masing sebagai bahan pembuatan laporan kepada Bupati Pringsewu;
- n. Melaporkan kebijakan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Bupati Pringsewu melalui Sekretaris Daerah dan Asisten Bidang Administrasi Umum;
- o. Membina bawahan dalam menyusun penetapan kinerja (PK), laporan instruksi Presiden (Inpres) Nomor : 2 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) laporan pertanggung jawaban (LPJ) laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) serta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Dinas sesuai dengan

format yang telah ditentukan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretaris Dinas mempunyai tupoksi:

- a. Menyusun program dan rencana kerja sekretariat dinas berdasarkan renstra dan program kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memimpin dan membina bawahan pada sekretariat dinas berdasarkan petunjuk pimpinan dan program dinas agar tugas dapat terselenggara dengan baik;
- c. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang komunikasi dan informatika serta peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan bidang ketatausahaan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Membina bawahan dalam menyelenggarakan pengelolaan administrasi surat menyurat, pemeliharaan arsip dan inventaris, dokumentasi dan perpustakaan, kehumasan dan ketatalaksanaan berdasarkan petunjuk pimpinan dan administrasi perkantoran yang berlaku untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas administrasi umum kantor;
- e. Mengarahkan bawahan dalam rangka menyusun program dan rencana kerja dinas berdasarkan peraturan yang berlaku agar program dan rencana kerja dinas yang disusun dapat terarah dan terencana dengan baik;
- f. Mengarahkan bawahan dalam menyelenggarakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi kepegawaian;
- g. Membimbing bawahan dalam mengelola perlengkapan/peralatan kantor dan rumah tangga dinas agar dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Membina bawahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi keuangan, kerjasama laporan, pertanggungjawaban

keuangan, laporan administrasi barang dan inventaris berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- i. Membimbing bawahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada dinas agar sesuai dengan program dan rencana yang telah disusun;
- j. Menilai hasil kerja bawahan;
- k. Membagi tugas kepada bawahan agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing;
- l. Menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam penyusunan program kerja selanjutnya;
- m. Membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna;
- n. Mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan penyempurnaan hasil kerja selanjutnya;
- o. Mengkordinasikan penyusunan laporan kegiatan dinas berdasarkan kordinasi dengan seluruh satuan unit kerja dinas dan laporan bawahan sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai bahan penyusunan program dan rencana kerja yang akan datang;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris dinas dibantu oleh 2 subbagian yaitu kasubbag perencanaan dan keuangan, dan kasubbag umum dan kepegawaian.

Kasubbag Perencanaan dan Keuangan memiliki tupoksi:

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di Dinas Komunikasi dan Informatika;

- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. Melakukan penyusunan laporan kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- f. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- g. Melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- h. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- i. Melakukan urusan gaji pegawai;
- j. Melakukan administrasi keuangan;
- k. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- l. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- m. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gantirugi;
- n. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kasubbag Umum dan Kepegawaian memiliki tupoksi:

- a. Melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;

- c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- i. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- j. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara;
- k. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- l. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- m. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- n. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Telekomunikasi dan Teknologi Informasi

Bidang Telekomunikasi dan Teknologi Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan telekomunikasi dan teknologi informasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Telekomunikasi dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan pembinaan telekomunikasi;
- b. Pengelolaan Jaringan dan Situs Web Pemerintah Daerah; dan
- c. Pengelolaan Standarisasi Penyiaran dan Media;

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seorang Kepala Bidang dan membawahi 3 Kepala Seksi yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan

fungsi sebagai berikut:

Seksi Telekomunikasi

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Telekomunikasi dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan pengelolaan telekomunikasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Telekomunikasi mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta analisis data penyelenggaraan dan pelayanan telekomunikasi;
- b. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan dan pelayanan telekomunikasi;
- c. Pelayanan dan pengendalian administrasi rekomendasi untuk pendirian jasa telekomunikasi;
- d. Pelayanan dan pengendalian administrasi penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya Daerah sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- e. Pelayanan dan pengendalian administrasi rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline (end to end)* cakupan Daerah;
- f. Pelayanan dan pengendalian administrasi sarana telekomunikasi Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
- g. Pelayanan dan pengendalian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
- h. Penyelenggaran pelayanan telekomunikasi.

Seksi Pengelolaan Jaringan dan Website Pemerintah Daerah

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Telekomunikasi dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan Pengelolaan Jaringan dan Website Pemerinta

Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Jaringan dan Website Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- A. Pengelolaan jaringan internet di lingkup pemerintah daerah;
- B. Penyusunan petunjuk teknis, perancangan, instalasi, pemeliharaan, dan pengawasan jaringan lingkup Pemerintah Daerah;
- C. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pengembangan desain;
- D. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan situs web Pemerintah Daerah;
- E. Pengelolaan situs Web Pemerintah Daerah;
- F. Pemutakhiran informasi situs web Pemerintah Daerah.
- G. Seksi Standarisasi Penyiaran dan Media

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Telekomunikasi dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan pengelolaan Standardisasi Penyiaran dan Media. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi standarisasi penyiaran dan media mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis terhadap standarisasi usaha penyiaran dan media di Kabupaten Pringsewu.
- b. Pengawasan dan Pengendalian terhadap usaha penyiaran dan media di Kabupaten Pringsewu;
- c. Melakukan inventarisasi permasalahan di Seksi Standarisasi Penyiaran dan Media serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. Menghimpun, mengumpulkan, mengolah bahan/data yang berhubungan dengan Seksi Standarisasi Penyiaran dan Media dalam rangka pelaksanaan tugas;
- e. Membuat kegiatan yang berhubungan dengan standarisasi penyiaran dan media.

Bidang Informasi Publik, Statistik dan Persandian

Bidang Informasi Publik, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan bidang informasi publik, statistik, dan persandian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang

Informasi Publik, Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan operasionalisasi informasi publik.
- b. Pengelolaan operasionalisasi Statistik.
- c. Pengelolaan operasionalisasi Persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Bidang informasi publik, statistika dan persandian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 3 Kepala Seksi yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: Seksi Informasi Publik

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Informasi Publik, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan pengelolaan informasi publik. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi informasi publik mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Seksi Informasi Publik;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Informasi Publik;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di Seksi Informasi Publik;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Informasi Publik.

Seksi Statistika

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknologi Informasi dalam melaksanakan pengelolaan operasional sistem informasi. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Statistika mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Seksi Statistika;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Statistika;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di Seksi Statistika;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Statistika.

Seksi Persandian

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Teknologi Informasi dalam melaksanakan pengembangan persandian daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Persandian mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Seksi Persandian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Persandian;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di Seksi Persandian;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Seksi Persandian.

4.1.8 Tujuan

Misi merupakan rumusan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai Visi deng menawarkan keunggulan tertentu. Dalam rangka pencapaian visi di atas, maka misi terkait e-Government dan membutuhkan dukungan dari pengembangan TIK

- a. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Sarana Layanan Publik Secara Merata,
- b. Membangun SDM Unggul dan Berkarakter
- c. Peningkatan daya saing perekonomian
- d. Meningkatkan penyelenggaraan tata kola pemerintahan yang profesional dan bersih.

Di mana poin-poin misi tersebut di atas dijabarkan dalam sasaran yang lebih detail sebagai berikut:

- a. Terjaminnya ketersediaan energi listrik, sambungan telepon dan koneksi internet baik kabel maupun nirkabel (Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi)
- b. Mengembangkan SDM kompetensi atau keahlian tertentu
- c. Berkembangnya ekonomi kreatif dengan konektivitas pasar yang luas (online domestik dan global) Meningkatnya kualitas aksesibilitas pelayanan

publik yang terintegrasi dan berbasis sistem informasi (Pringsewu sebagai Smart Region atau Kabupaten Cerdas)

- d. Terintegrasinya sistem perencanaan pembangunan, penganggaran, pengelolaan dan pelaporan program kegiatan dan keuangan daerah yang reliabel dan akuntabel berbasis teknologi informasi
- e. Meningkatkan sistem komunikasi dan informasi serta kerjasama dengan media massa

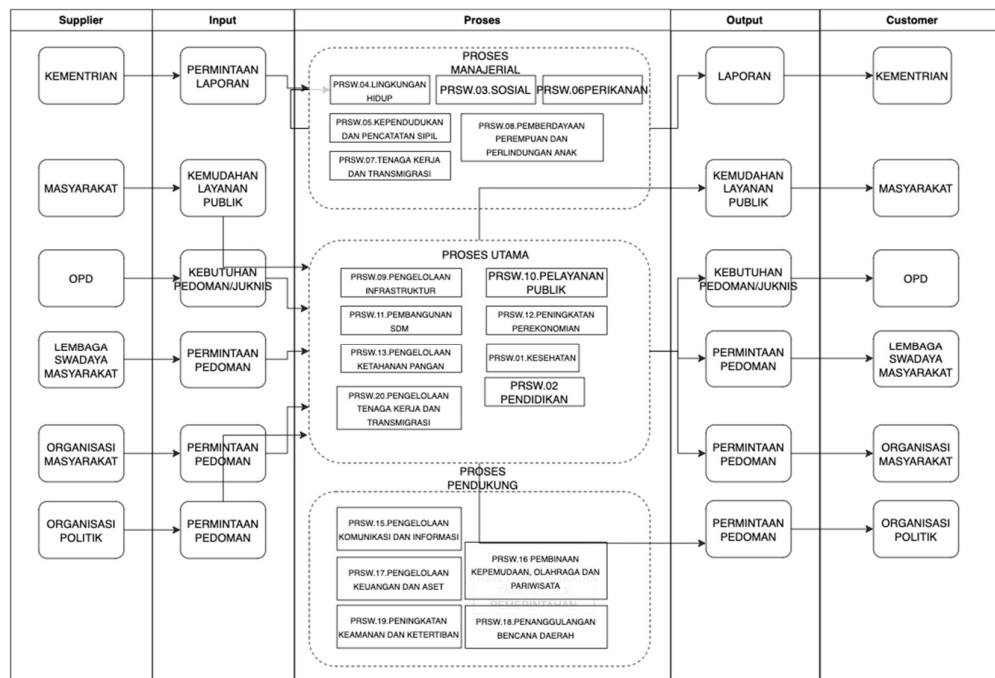
4.2 Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Pringsewu

Untuk mendapatkan proses bisnis yang ada pada dinas komunikasi dan kabupaten kami mencoba untuk melihat beberapa aspek, Proses bisnis Dinas Komunikasi dan Informasi kabupaten pringsewu akan mengacu pada proses bisnis Kabupaten Pringsewu dengan pelaksanaan fungsi TIK dan dukungan Sumber daya dan infrastruktur yang ada pada dinas Kominfo TIK, untuk mendapatkan proses bisnis maka terlebih dahulu akan di susun proses bisnis Kabupaten secara keseluruhan sesuai yang di dapatkan dari tugas dan fungsi seluruh OPD yang ada di kabupaten pringsewu antara lain di bidang

1. Bidang Komunikasi dan Informatika
2. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Bidang Kesehatan
4. Bidang Perhubungan
5. Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
7. Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
8. Bidang Sosial
9. Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10. Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
11. Bidang Perikanan
12. Bidang Pertanian
13. Bidang Lingkungan Hidup
14. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

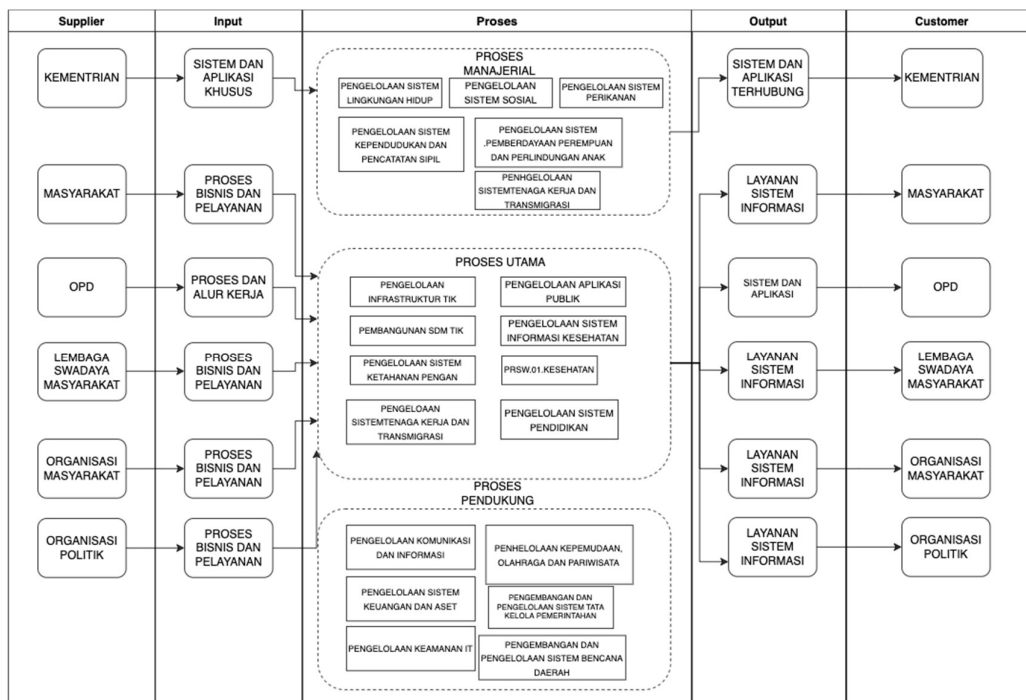
15. Bidang Perpustakaan dan Arsip
16. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
17. Bidang Ketahanan Pangan
18. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang-bidang tersebut maka kami membaginya dalam kelompok proses utama, proses pendukung, dan proses manajerial. Keseluruhan bidang tersebut digambarkan dalam Diagram proses bisnis yang mengacu pada standarisasi proses bisnis yang ada dalam SPBE sebagai berikut.



Gambar 4.2 Proses Bisnis kabupaten Pringsewu secara keseluruhan.

Berdasarkan proses bisnis yang ada di Kabupaten Pringsewu, maka dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Pringsewu merumuskan Diagram proses bisnis yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten Pringsewu, proses bisnis ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab serta fungsi dinas komunikasi dan informatika Kabupaten untuk menjalankan fungsi TIK pada kabupaten Pringsewu. Proses bisnis level 1. Akan di gambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.3 Proses Bisnis kabupaten Pringsewu secara keseluruhan

Dalam proses bisnis diagram level satu tersebut maka akan diturunkan kembali menjadi sub sub bagian yang digambarkan sebagai bentuk rinci dari layanan yang diperlukan dan dikelola oleh dinas komunikasi dan informatika kabupaten pringsewu, berikut ini adalah susunan diagram level dua yang secara rinci akan menampilkan subproses dari proses level satu.

A. Subproses Bidang Kesehatan

Dalam bidang Kesehatan terdapat beberapa sub proses, dari proses level 0, proses level 1 dalam bidang ini akan memunculkan layanan, seperti

1. Sistem Informasi Sumberdaya Kesehatan.
2. Sistem informasi pelayanan Kesehatan
3. Sistem informasi pencegahan dan pengendalian penyakit
4. Sistem Informasi Kesehatan masyarakat.

Subproses di gambarkan pada bagan berikut :



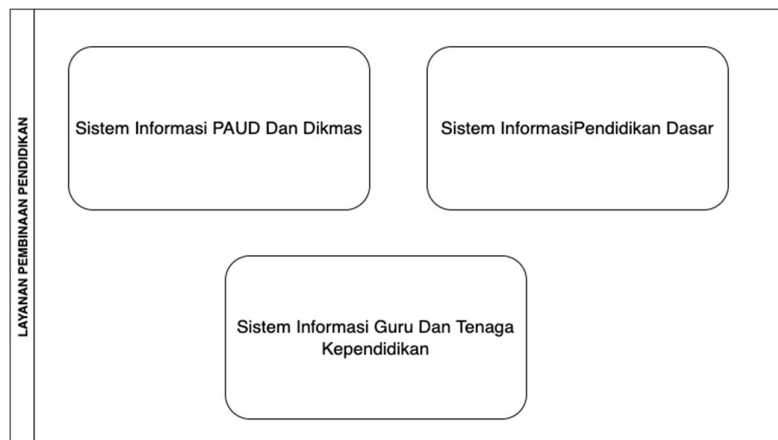
Gambar 4.4 Diagram Subproses Bidang Kesehatan

B. Layanan Bidang Pendidikan

Dalam bidang Pendidikan terdapat beberapa sub proses, dari proses level 0, proses level 1 dalam bidang ini akan memunculkan layanan, seperti

1. Sistem Informasi PAUD dan Dikmas
2. Sistem informasi Pendidikan Dasar
3. Sistem informasi Guru dan tenaga kependidikan

Subproses di gambarkan pada bagan berikut :



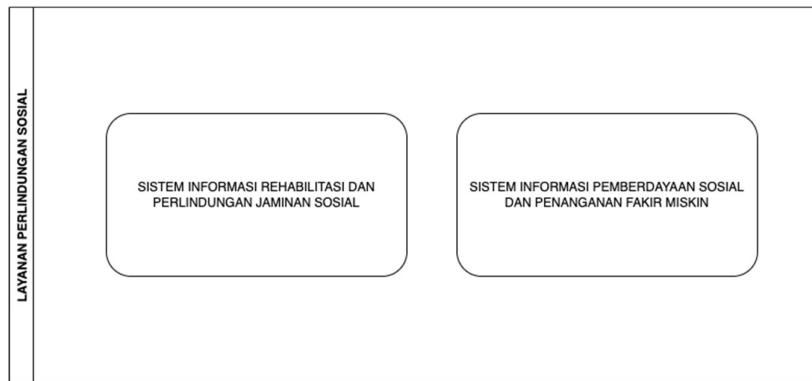
Gambar 4.5 Diagram Subproses Bidang Pendidikan

C. Layanan bidang Sosial

Dalam bidang Sosial terdapat beberapa sub proses, dari proses level 0, proses level 1 dalam bidang ini akan memunculkan layanan, seperti

1. Sistem Informasi Rehabilitasi dan Perlindungan jaminan sosial
2. Sistem informasi Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin

Subproses di gambarkan pada bagan berikut :



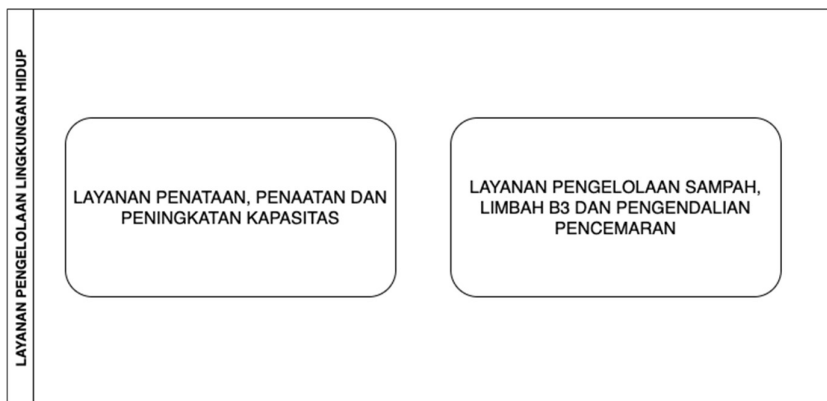
Gambar 4.6 Diagram Subproses Bidang Sosial

D. Layanan Pengelolaan lingkungan hidup

Dalam bidang Lingkungan hidup terdapat beberapa sub proses, dari proses level 0, proses level 1 dalam bidang ini akan memunculkan layanan, seperti

1. Layanan Penataan dan Peningkatan Kapasitas
2. Layanan Pengelolaan sampah dan limbah pengendalian pencemaran

Subproses di gambarkan pada bagan berikut :

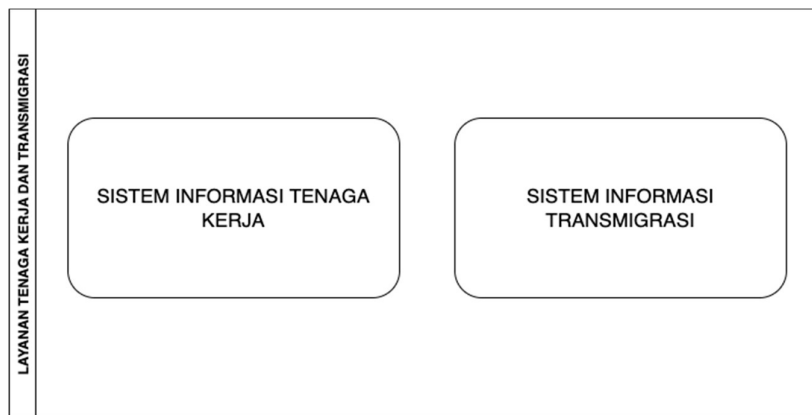


Gambar 4.7 Diagram Subproses Bidang Lingkungan Hidup

E. Layanan Pengelolaan Tenaga Kerja

Dalam bidang Tenaga Kerja terdapat beberapa sub proses, dari proses level 0, proses level 1 dalam bidang ini akan memunculkan layanan, seperti

1. Sistem Informasi Tenaga Kerja
2. Sistem Informasi Transmigrasi



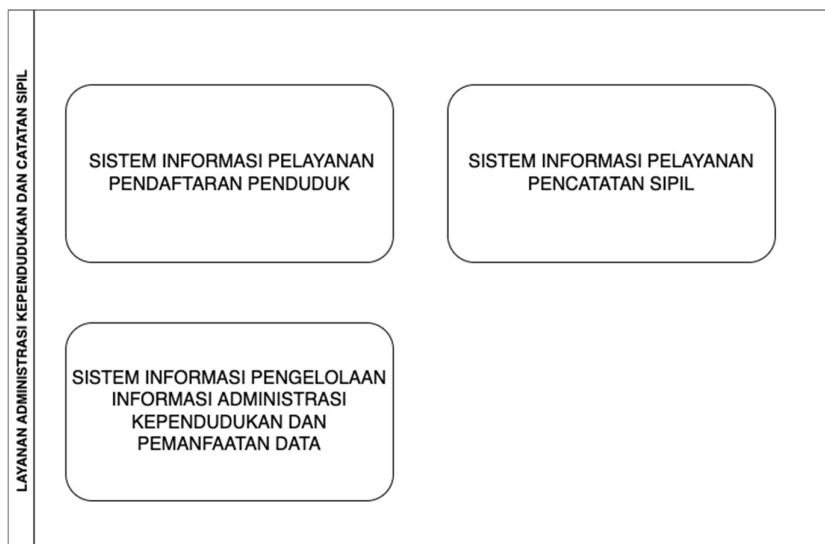
Gambar 4.8 Diagram Subproses Bidang Tenaga Kerja

F. Layanan Pengelolaan Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam bidang Kependudukan dan catatan sipil terdapat beberapa sub proses, dari proses level 0, proses level 1 dalam bidang ini akan memunculkan layanan, seperti

1. Sistem Informasi Pelayanan Pendaftaran penduduk
2. Sistem informasi pelayanan pencatatan sipil
3. Sistem informasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data

Subproses di gambarkan pada bagan berikut :



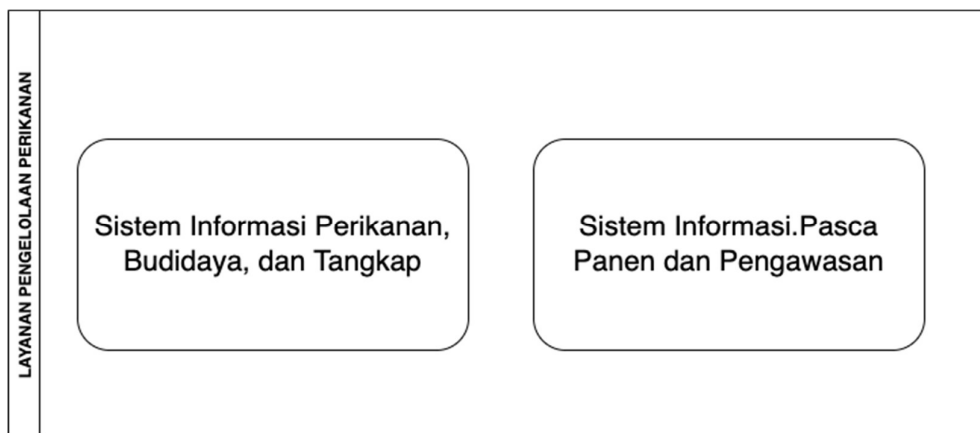
Gambar 4.9 Diagram Subproses Kependudukan dan Catatan Sipil

G. Layanan Pengelolaan Perikanan

Dalam bidang Pengelolaan perikanan terdapat beberapa sub proses, dari proses level 0, proses level 1 dalam bidang ini akan memunculkan layanan, seperti

1. Sistem Informasi Perikanan budidaya dan tangkap
2. Sistem informasi Pasca panen dan pengawasan

Subproses di gambarkan pada bagan berikut :



Gambar 4.8 Diagram Subproses Perikanan

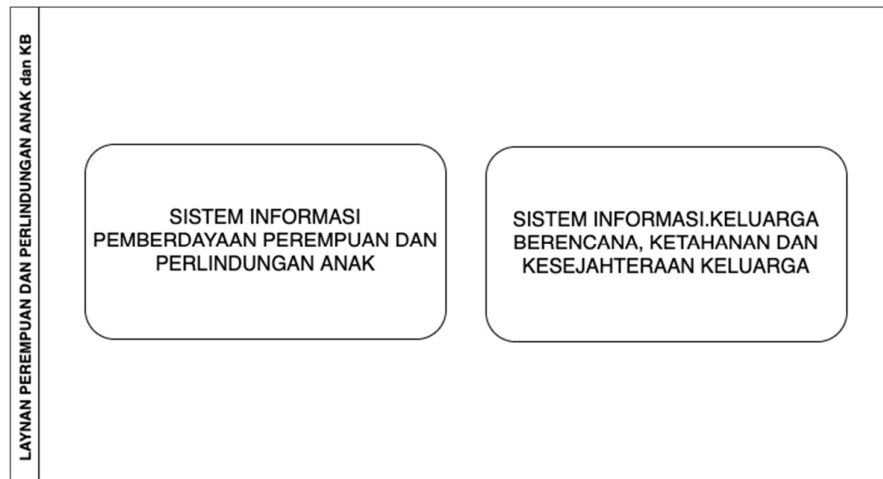
H. Layanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

terdapat beberapa sub proses, dari proses level 0, proses level 1 dalam bidang ini akan memunculkan layanan, seperti

1. Sistem Informasi Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Sistem informasi keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Subproses di gambarkan pada bagan berikut :



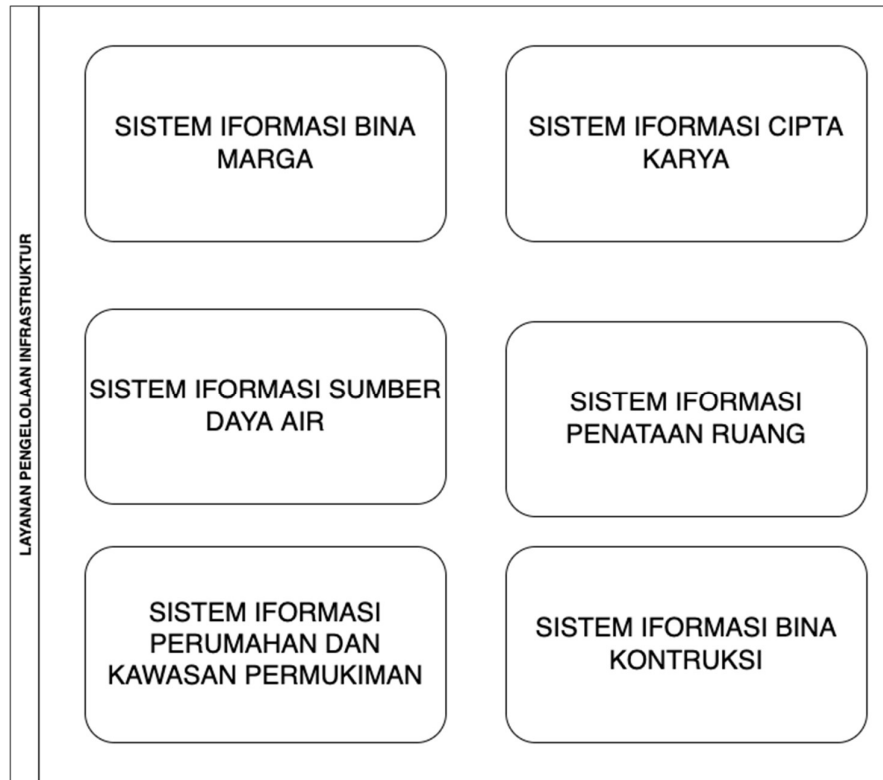
Gambar 4.9 Diagram Subproses Perikanan

I. Layanan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat beberapa sub proses, dari proses level 0, proses level 1 dalam bidang ini akan memunculkan layanan, seperti

1. Sistem Informasi Bina Marga
2. Sistem informasi Cipta karya
3. Sistem informasi sumber daya air
4. Sistem informasi Penataan ruang
5. Sistem informasi Perumahan dan pemukiman
6. Sistem informasi Bina konstruksi

Subproses di gambarkan pada bagan berikut :

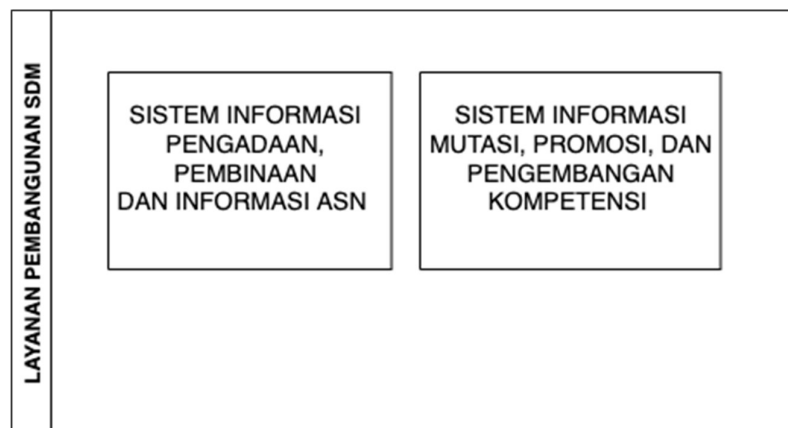


Gambar 4.10 Diagram anan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

J. Layanan Pembangunan SDM

Dalam bidang Pembangunan SDM terdapat beberapa sub proses, dari proses level 0, proses level 1 dalam bidang ini akan memunculkan layanan, seperti

1. Sistem Informasi Pengadaan pembinaan dan informasi ASN
2. Sistem informasi Mutasi, Promosi dan pengembangan kompetensi

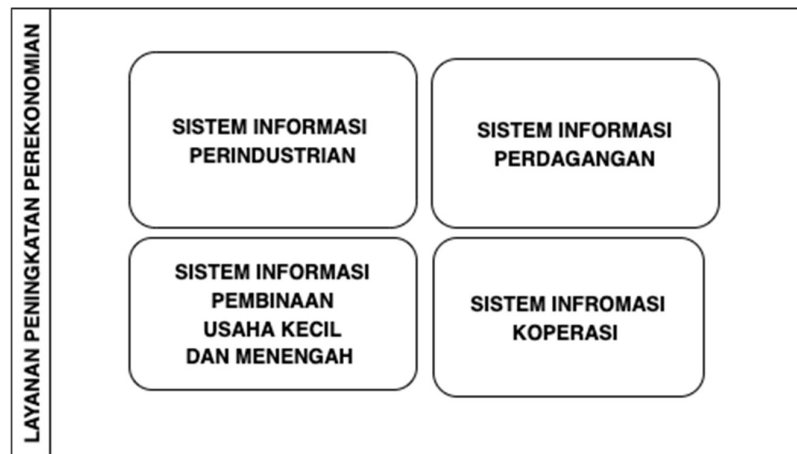


Gambar 4.11 Diagram Pembangunan SDM

K. Layanan Peningkatan Perekonomian

Dalam bidang Peningkatan Perekonomian terdapat beberapa sub proses, dari proses level 0, proses level 1 dalam bidang ini akan memunculkan layanan, seperti

1. Sistem Informasi Perindustrian
2. Sistem informasi Perdagangan
3. Sistem informasi Pembinaan UMKM
4. Sistem informasi Koperasi



Gambar 4.12 Diagram Peningkatan Perekonomian

L. Pengelolaan informasi dan Komunikasi

Dalam bidang Informasi dan komunikasi terdapat beberapa sub proses, dari proses level 0, proses level 1 dalam bidang ini akan memunculkan layanan, seperti

1. Sistem Informasi Pengelolaan Informasi dan komunikasi
2. Tata Kelola SPBE, persandian dan Keamanan informasi



Gambar 4.13 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

4.3 Analisis SWOT

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yaitu hasil pendalaman potensi dan permasalahan (analisis lingkungan strategis, permasalahan dan tantangan) dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu yang berhubungan dalam proses bisnis, sehingga diketahui faktor-faktor yang menjadi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Bagan Analisis SWOT dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Input untuk analisis SWOT ini adalah kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*), yang mana keempat faktor tersebut didapatkan dari hasil analisis kondisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu. *Output* dari analisis SWOT ini adalah rumusan SO, ST, WO dan WT.

Analisis SWOT dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu yang mana terdiri dari kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*).

Analisis kekuatan dilakukan untuk mengetahui kekuatan apa saja yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu sehingga dapat mempertahankan bisnis, dengan mengetahui letak kekuatan dari Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Pringsewu, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu akan memiliki kompetisi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu dipasar.

Analisis kelemahan dilakukan untuk mengetahui keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu dapat memperbaiki kelemahan tersebut menjadi kekuatan.

Analisis peluang dilakukan untuk mengetahui hal-hal penting yang dipergunakan untuk menghasilkan keuntungan dalam lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu baik peluang masa kini dan peluang yang akan datang, dengan begitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu dapat menyiapkan strategi-strategi baru demi memanfaatkan peluang tersebut.

Analisis SWOT adalah sebuah teknik yang digunakan dalam proses perencanaan atau penentuan strategi. Teknik ini diperlukan untuk analisis dan kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) yang ada pada suatu organisasi secara detail. Analisis SWOT ditujukan untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki guna meraih peluang serta menghadapi ancaman yang ada. Selain itu, analisis ini juga ditujukan untuk mengatasi kelemahan agar tidak menghambat peluang-peluang tersebut.

Strengths (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan) adalah berasal dari internal Kondisi TIK yang ada dalam kabupaten Pringsewu. Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman) adalah hal eksternal di bidang TIK dan penerapan SPBE yang mempengaruhi atau hal-hal yang terjadi di luar Kabupaten Pringsewu. Berikut ini adalah rincian SWOT yang di dapatkan oleh peneliti

Strength- (S):

- Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan SPBE.

- Memiliki SDM yang potensial untuk dikembangkan dan berpengalaman dalam melaksanakan aplikasi SPBE
- Jumlah aplikasi yang besar mampu menangani proses aplikasi pelayanan publik maupun administrasi pemerintah.
- Jumlah infrastruktur Server dan spesifikasi server yang memadai.

Weakness- (W):

- Jumlah sumber daya manusia sebagai pelaksana kerja di bidang TIK Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu masih terbatas.
- Perencanaan dan pengembangan aplikasi SPBE belum seluruhnya menganut asas berbagi layanan dan data.
- Sebagian aplikasi publik yang berasal dari pemerintah pusat belum terkoneksi dengan aplikasi pemerintah daerah.
- Pengembangan aplikasi belum seluruhnya memiliki roadmap yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah daerah.
- Anggaran yang terbatas untuk melakukan pengembangan SPBE secara bertahap
- Infrastruktur TIK belum merata ke berbagai OPD dan kecamatan agar penerapan SPBE dapat terintegrasi maksimal

Opportunity (O) :

- Pemerintah pusat menyediakan aplikasi umum SPBE yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah.
- Terdapat banyak pihak ketiga yang kompeten dalam bidang TIK.
- Terdapat banyak perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang bereputasi dalam mendidik tenaga terampil di bidang TIK.
- Harga peralatan komputer dan akses internet yang semakin terjangkau.
- Tersedia lulusan IT yang berpotensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi TIK.

Threats (T):

- Kemajuan TIK sangat pesat dan cepat membuat *hardware*, *software* dan *brainware* menjadi cepat usang sehingga membutuhkan pemutakhirannya secara berkala.

- Kebutuhan *availability*, *reliability*, dan *integrity* sistem kian hari kian meningkat.
- Hecker, virus komputer, dan *hardware malfunction* sangat mungkin merusak tanpa terduga.

Tabel 4.2 SWOT Analisis

<p>Strength- (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan SPBE. • Memiliki SDM yang potensial untuk dikembangkan dan berpengalaman dalam melaksanakan aplikasi SPBE • Jumlah aplikasi yang besar mampu menangani proses aplikasi pelayanan publik maupun administrasi pemerintah. • Jumlah infrastruktur Server dan spesifikasi server yang memadai. 	<p>Weakness- (W):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah sumber daya manusia sebagai pelaksana kerja di bidang TIK Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu masih terbatas. • Perencanaan dan pengembangan aplikasi SPBE belum seluruhnya menganut asas berbagi layanan dan data. • Sebagian aplikasi publik yang berasal dari pemerintah pusat belum terkoneksi dengan aplikasi pemerintah daerah. • Pengembangan aplikasi belum seluruhnya memiliki roadmap yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah daerah. • Anggaran yang terbatas untuk melakukan pengembangan SPBE secara bertahap • Infrastruktur TIK belum merata ke berbagai OPD dan kecamatan agar penerapan SPBE dapat terintegrasi maksimal
---	---

<p>Opportunity (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah pusat menyediakan aplikasi umum SPBE yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah. • Terdapat banyak pihak ketiga yang kompeten dalam bidang TIK. • Terdapat banyak perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang bereputasi dalam mendidik tenaga terampil di bidang TIK. • Harga peralatan komputer dan akses internet yang semakin terjangkau. • Tersedia lulusan IT yang berpotensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi TIK. 	<p>Threats (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemajuan TIK sangat pesat dan cepat membuat <i>hardware</i>, <i>software</i> dan <i>brainware</i> menjadi cepat usang sehingga membutuhkan pemutakhirnya secara berkala. • Kebutuhan <i>availability</i>, <i>reliability</i>, dan <i>integrity</i> sistem kian hari kian meningkat. • Hecker, virus komputer, dan <i>hardware malfunction</i> sangat mungkin merusak tanpa terduga.
---	--

Tabel 4.3. Bagan Analisis SWOT Kondisi Aktual SPBE Kab. Pringsewu Berdasarkan strength, weakness, opportunities, dan threats yang telah diungkapkan pada Tabel 4,1 maka dapat dibuat beberapa strategi SO, WO, ST, dan WT yang secara detail sebagai berikut:

<p>Strength-Opportunities (SO):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan aplikasi umum SPBE yang tersedia untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah (Pemda). • Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi khusus SPBE yang diperlukan untuk 	<p>Weakness- Opportunities (WO):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Tenaga IT sebagai pelaksana teknis TIK maupun pengembang TIK • Bekerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan tertentu untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang TIK.
--	--

<p>meningkatkan kualitas layanan publik yang diselenggarakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan untuk penerapan SPBE yang terintegrasi. • intergrasi server milik berbagai OPD, agar dapat berbagi data maupun layanan.
<p>Strength- Threats (ST) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat rencana pengembangan SPBE yang dapat mengadaptasikan kemajuan TIK yang pesat dan cepat • Membangun infrastruktur yang memungkinkan SPBE diterapkan dengan availability, reliability, dan integrity yang tinggi • Membangun data center yang dilengkapi dengan pengamanan data yang baik serta disaster recovery center untuk mengantisipasi kerusakan data yang tidak terduga 	<p>Weakness-Threats (WT):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun kesadaran akan penting pemutakhiran pengetahuan dan kemampuan SDM dalam bidang TIK untuk mengimbangi perkembangan yang ada. • Perlu dibuat SOP pelaksanaan SPBE terkait availability, reliability, integrity, data security dan data recovery

Tabel 4.3. Bagan Strategi SO, WO, ST, dan WT Kondisi Aktual SPBE

4.4 Analisis Value Chain

Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuten Pringsewu yaitu hasil pengamatan dan pemetaan tugas dan fungsi dari masing-masing divisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuten Pringsewu maka diketahui aktivitas utama dan aktivitas pendukung yang dikumpulkan dalam model value chain. Analisis value chain dilakukan untuk merinci suatu rangkaian dari alir kerja atau proses kerja yang digunakan menjadi

kegiatan strategi yang relevan untuk memahami dari bahan baku hingga produk akhir. Bagan analisis value chain dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Berdasarkan value *chain*, aktivitas internal organisasi dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas utama (*primary activities*) dan aktivitas pendukung (*support activities*). Saat ini kabupaten pringsewu belum memiliki bagan value chain, karena itu penulis mencoba untuk mendesain value chain berdasarkan *prises* bisnis yang ada



Gambar 4.1. Bagan Strategi SO, WO, ST, dan WT Kondisi Aktual SPBE

4.5 Analisis Kebutuhan Informasi

Analisis kebutuhan informasi diperoleh dari analisis Kebutuhan Data Indikator Spbe. Kemudian, dilakukan pendalaman lagi terhadap Kebutuhan Data Indikator Spbe/sasaran melalui *measures*/indikator. Selanjutnya, ukuran tersebut dipetakan ke dalam *value chain* untuk mendapatkan kebutuhan informasi pada bagian-bagian yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu. Identifikasi kebutuhan informasi pada bagian-bagian yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu terdiri dari enam kolom, yaitu: tujuan, Kebutuhan Data Indikator Spbe/Sasaran, *measure*/indikator sasaran

program, *value chain*, analisis SWOT dan kebutuhan informasi

Kebutuhan informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu tentunya berbeda di masing- masing divisi. Kebutuhan akan informasi dapat diperoleh dari analisis Kebutuhan Data Indikator SPBE sebelumnya yang menganalisis tujuan dari masing-masing divisi di dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu. Kemudian, setiap Kebutuhan Data Indikator SPBE akan dievaluasi dan dicari kesesuaiannya dengan rumusan SO, ST, WO dan WT. yang didapat dari analisis SWOT. Hasil dari analisis kebutuhan informasi tersebut akan dipetakan dalam seluruh aktivitas bisnis yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu. Analisis kebutuhan informasi pada setiap divisi akan terdiri dari enam kolom, yaitu: tujuan masing-masing divisi, Kebutuhan Data Indikator SPBE, *measures*, strategi SWOT, *value chain*, *business model canvas* dan kebutuhan informasi. Berikut adalah

4.6 Analisis PEST

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yaitu hasil pengamatan dan pendalaman terkait faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor teknologi, faktor hukum dan faktor lingkungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu sehingga diketahui faktor-faktor eksternal yang digunakan untuk menentukan dan mempengaruhi lingkungan bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu. Bagan analisis PEST dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Analisis PEST merupakan suatu cara atau alat yang bermanfaat untuk meringkas lingkungan eksternal dalam operasi bisnis. PEST harus ditindaklanjuti dengan pertimbangan bagaimana bisnis harus menghadapi pengaruh dari lingkungan politik, ekonomi, sosial, teknologi, Analisis PEST mencakup kondisi lingkungan makro Indonesia, yaitu perekonomian, teknologi, Analisis PESTEL terkait dengan pengaruh lingkungan pada suatu bisnis. Analisis PEST untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu dapat dipaparkan seperti di bawah ini.

A. Faktor Politik

Kondisi perpolitikan di Indonesia mengalami bandingkan dengan beberapa negara lain, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara demokrasi dengan banyak sekali suku bangsa agama serta golongan. Begitu pula di Kabupaten Pringsewu kondisi perpolitikan mengalami pergolakan yang cukup dinamis. Sistem pemerintahan yang memiliki struktur dan skema kepegawaian yang cukup mudah mengalami perubahan dengan signifikan dan cepat.

Contoh yang sangat dirasakan adalah Ketika salah satu jabatan tertentu pada unit kerja atau eselon yang dijabat oleh seseorang dapat dengan mudah berubah posisi sesuai dengan kondisi perpolitikan dan kebutuhan yang ada.

Keberadaan kebijakan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memungkinkan perubahan pada setiap lini dan masing masing indikator yang menjadi bahan dan menjadi acuan dalam pengembangan pemerintahan berbasis elektronik. Dengan perubahan tersebut maka perencanaan strategis maupun kerja kerja di bidang Aiti yang saat ini di Akomodir oleh dinas komunikasi informatika juga mengalami perubahan yang cukup signifikan sesuai dengan kebutuhan tersebut.

B. Faktor Ekonomi

Ini merupakan salah satu faktor yang cukup mempengaruhi perubahan dan penyusunan strategi sistem informasi maupun teknologi informasi, hal ini dikarenakan karena perencanaan strategi sistem informasi membutuhkan anggaran dan biaya yang tidak sedikit.

Selain biaya yang cukup besar faktor sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi juga masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi Instansi yang ada di Kabupaten Pringsewu untuk dapat mencukupi kebutuhan akan sumber daya manusia yang dapat membangun, mengembangkan dan melakukan implementasi dari kebijakan dan rencana strategis yang nantinya akan dikembangkan.

C. Faktor Sosial

Dorongan faktor sosial berpengaruh pada proses rencana strategis sistem informasi dan teknologi informasi karena pengembangan rencana strategis ini akan mempengaruhi potensi dan kondisi yang ada di pengguna tingkat akhir dalam hal ini

adalah, Para masyarakat pengguna layanan khusus atau layanan publik, serta pegawai yang akan menggunakan layanan yang bersifat layanan umum.

Kondisi sosial yang ada di Kabupaten Pringsewu memiliki keberagaman yang cukup tinggi mulai dari Sisi pendidikan, kemampuan penggunaan teknologi, serta dukungan lingkungan yang juga berpengaruh pada kecerdasan digital para warga masyarakat. Oleh karena itu dalam pengembangan rencana strategis, diperlukan untuk melihat faktor yang berkaitan dengan efek social yang akan ditimbulkan dengan adanya aturan dan proses bisnis yang baru dengan penerapan teknologi informasi.

D. Faktor Teknologi

Trend teknologi yang semakin berkembang dan bermunculan layanan layanan baru, Teknologi dalam pengembangan aplikasi hal tersebut akan mempengaruhi rencana strategis yang akan dirancang karena akan merubah struktur dan bangunan aplikasi yang telah dimiliki sebelumnya. Kemudian tren teknologi yang berlangsung juga akan mengakibatkan lack of informations tentang pengembangan teknologi terutama dari Sisi pengembang, karena tuntutan untuk memperbaiki teknologi yang telah dibuat sebelumnya.

4.7 Analisis Lingkungan SI/TI Internal

Analisis pada lingkungan SI/TI internal, dilakukan guna memperoleh gambaran mengenai kondisi infrastruktur SI/TI yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuten Pringsewu saat ini. Hal ini sebagai dasar pertimbangan melakukan perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi. Setelah memahami situasi bisnis dan arahnya, pada tahapan analisis ini akan dibahas bagaimana struktur organisasi SI/TI yang ada diterapkan saat ini, pemaparan aplikasi SI dan hubungan antara aplikasi SI,

Berdasarkan hasil survei identifikasi pada seluruh OPD di lingkungan Pemkab Pringsewu saat ini sekitar 100% OPD telah memiliki jaringan komputer lokal yang terdiri dari jaringan kabel maupun nirkabel (wireless), meskipun banyak dari jaringan tersebut yang belum diberdayakan secara maksimal karena beberapa OPD menggunakan jaringan nirkabel yang berasal dari paket pengadaan (pembelian atau sewa) koneksi internet dari penyedia jasa internet, di mana komputer bisa mengakses jaringan internet dari perangkat access point tersebut saling terkoneksi antar

komputer, namun yang perlu dicatat paling tidak OPD tersebut sudah memiliki kemampuan infrastruktur untuk membangun koneksi antar komputer. Sebagian besar jaringan dalam kompleks Pemkab Pringsewu sudah terkoneksi dan kontrl penuh oleh Dinas KOMINFO Kabupaten Pringsewu dengan lainnya,

Pada tingkat kelurahan dan pekon tercatat sekitar 80% pekon sudah memiliki potensi untuk membangun jaringan lokal secara nirkabel (lewat perangkat access point) yang berasal dari paket pengadaan internet. Untuk kondisi aktual mengenai sistem dan layanan SPBE serta kondisi ideal yang akan di capai, mengacu pada indikator SPBE sebagai berikut :

Tabel 4.2 Analisis Lingkungan Internal Berbabis Indikator SPBE

No.	Indikator	Kondisi Aktual	Kondisi Ideal
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu waktu	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan	Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan

No.	Indikator	Kondisi Aktual	Kondisi Ideal
		diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.	reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	Kebijakan Internal Manajemen Data sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.	Kebijakan Internal Manajemen Data yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu waktu	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja

No.	Indikator	Kondisi Aktual	Kondisi Ideal
		sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi.	penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi.	Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu waktu	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.

No.	Indikator	Kondisi Aktual	Kondisi Ideal
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu waktu	Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	Kebijakan Internal Audit TIK dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu waktu	Kebijakan Internal Audit TIK yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.

No.	Indikator	Kondisi Aktual	Kondisi Ideal
		unit kerja dalam organisasi.	
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu waktu	Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	Rencana dan Anggaran SPBE sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan	Rencana dan Anggaran SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat

No.	Indikator	Kondisi Aktual	Kondisi Ideal
		diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.	diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	Inovasi Proses Bisnis SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu waktu	Inovasi Proses Bisnis SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Pembangunan Aplikasi SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu waktu	Pembangunan Aplikasi SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Layanan Pusat Data sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua	Layanan Pusat Data yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada

No.	Indikator	Kondisi Aktual	Kondisi Ideal
		unit kerja dalam organisasi.	setiap proses penerapan SPBE.
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen yang sesuai pedoman/standar dan diterapkan pada semua unit kerja dalam organisasi.	Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu waktu	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.

No.	Indikator	Kondisi Aktual	Kondisi Ideal
	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.	Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	Kolaborasi Penerapan SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu waktu	Kolaborasi Penerapan SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Penerapan Manajemen Risiko SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu waktu	Penerapan Manajemen Risiko SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.

No.	Indikator	Kondisi Aktual	Kondisi Ideal
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu waktu	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Penerapan Manajemen Data dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu waktu	Penerapan Manajemen Data yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	Penerapan Manajemen Aset TIK dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu waktu	Penerapan Manajemen Aset TIK yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.

No.	Indikator	Kondisi Aktual	Kondisi Ideal
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia sudah dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen dan diterapkan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	Penerapan Manajemen Pengetahuan dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu waktu	Penerapan Manajemen Pengetahuan yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	Penerapan Manajemen Perubahan dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu waktu	Penerapan Manajemen Perubahan yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.

No.	Indikator	Kondisi Aktual	Kondisi Ideal
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Penerapan Manajemen Layanan SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu waktu	Penerapan Manajemen Layanan SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu waktu	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu waktu	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.

No.	Indikator	Kondisi Aktual	Kondisi Ideal
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dilakukan tanpa perencanaan dan sewaktu waktu	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	Layanan Perencanaan yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	Layanan Perencanaan yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	Layanan Penganggaran diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain	Layanan Penganggaran diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	Layanan Keuangan diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain	Layanan Keuangan diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain

No.	Indikator	Kondisi Aktual	Kondisi Ideal
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	Layanan Kepegawaian diberikan dalam bentuk informasi satu arah.	Layanan Kepegawaian diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	Layanan Kearsipan Dinamis diberikan dalam bentuk informasi satu arah.	Layanan Kearsipan Dinamis diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain
40	Tingkat Kematangan Layanan	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi diberikan dalam	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain

No.	Indikator	Kondisi Aktual	Kondisi Ideal
	Akuntabilitas Kinerja Organisasi	bentuk informasi satu arah.	
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	Layanan Kinerja Pegawai diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.	Layanan Kinerja Pegawai diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	Layanan Data Terbuka diberikan dalam bentuk informasi satu arah.	Layanan Data Terbuka diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain
45	Tingkat Kematangan	Layanan Publik Sektor 1 diberikan dalam	Layanan Publik Sektor 1 diberikan melalui

No.	Indikator	Kondisi Aktual	Kondisi Ideal
	Layanan Publik Sektor 1	bentuk interaksi dua arah.	integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	Layanan Publik Sektor 2 diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.	Layanan Publik Sektor 2 diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	Layanan Publik Sektor 3 diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.	Layanan Publik Sektor 3 diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain

4.8 Portofolio Aplikasi Saat Ini pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuten Pringsewu

Portofolio aplikasi yang ada saat ini yang berguna untuk analisis yang menghasilkan nilai sistem informasi yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuten Pringsewu. Analisis ini untuk mengetahui nilai sistem informasi masuk dalam kategori high potential, strategic, key operational, atau support yang sesuai dengan kontribusi yang ada pada sistem operasional pada Kabupaten Pringsewu. Beberapa kriteria umum dapat dijadikan ukuran untuk menentukan sejauh mana TIK telah diterapkan pada Kabupaten Pringsewu, salah satunya adalah melihat portofolio aplikasi dan sistem yang di Kelola oleh kabupaten pringsewu.

Tabel 4.3 Layanan web Level 1

No	OPD	URL Website
1	Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA)	http://bapenda.pringsewukab.go.id/
2	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)	http://bappeda.pringsewukab.go.id/
3	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)	http://bpkad.pringsewukab.go.id/

4	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL)	http://disdukcapii.pringsewukab.go.id
5	Dinas Perhubungan (DISHUB)	http://dishub.pringsewukab.go.id
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR)	http://pupr.pringsewukab.go.id/
7	Dinas Komunikasi Dan Informatika (DISKOMINFO)	https://diskominfo.pringsewukab.go.id
8	(DPM-PTSP)	http://perizinan.pringsewukab.go.id
9	INSPEKTORAT	http://inspektorat.pringsewukab.go.id/
10	Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja (POL P.P)	http://polpp.pringsewukab.go.id/
11	Dinas Kesehatan (DINKES)	http://dinkes.pringsewukab.go.id
12	Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM)	http://bkpsdm.pringsewukab.go.id
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD)	http://disdikbud.pringsewukab.go.id
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	http://bpbd.pringsewukab.go.id/
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan (DISKOPERINDAG)	http://diskoperindag.pringsewukab.go.id
16	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL)	http://kesbangpol.pringsewukab.go.id/
17	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri	http://korpri.pringsewukab.go.id/
18	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS)	http://disnakertrans.pringsewukab.go.id
19	Dinas Keperpustakaan & Kearsipan	http://perpusda.pringsewukab.go.id
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Perkotaan (DPMP)	http://dpmp.pringsewukab.go.id
21	Dinas Pertanian (DISTAN)	http://distan.pringsewukab.go.id

22	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DISPORA)	http://disporpar.pringsewukab.go.id
23	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	http://rsud.pringsewukab.go.id/
24	Bagian Bina Administrasi Pembangunan	http://setda.adpem.pringsewukab.go.id
25	Sekretariat DPRD	http://sekretariatdprd.pringswukab.go.id
26	Dinas Ketahanan Pangan (DKP)	http://dkp.pringsewukab.go.id

4.9 Portofolio Infrastruktur Saat Ini pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu

infrastruktur fisik dan non-fisik. Infrastruktur fisik terdiri atas infrastruktur penghubung, infrastruktur pengelola dan infrastruktur operasional. Infrastruktur penghubung meliputi jaringan internet dan intranet. Infrastruktur pengelola yaitu berupa server sedangkan infrastruktur operasional yaitu komputer operasional SPBE. Pada bagian pengelola, backup server sangat penting untuk mitigasi bencana teknologi.

Pada unsur perangkat keras komputer, seluruh OPD di lingkungan Pemkab telah memiliki komputer dengan peripheral pendukungnya (printer dan scanner) dengan tahun pengadaan yang beragam sehingga sulit untuk memperkirakan retensi penggunaan serta kinerjanya. Idealnya masa aktif kinerja perangkat komputer adalah lima tahun, karena dalam lima tahun hal ini penting untuk memperkirakan peremajaan perangkat di suatu OPD. Berdasarkan survei diidentifikasi terdapat 6 OPD yang telah memiliki server sendiri dan berada dalam Server Room Diskominfo Pringsewu untuk berbagai kebutuhannya, 6 OPD tersebut adalah Bagian Bina Administrasi Pembangunan (1 server), Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) (2 server), Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) (2 server) dan Dinas Sosial (DINSOS) (1 server)

4.10 Analisis Lingkungan SI/TI Eksternal

Analisis lingkungan SI/TI eksternal dilakukan melalui *input* hasil studi kepustakaan (literatur sejenis dan jurnal) dengan analisa tren teknologi yang berkembang sehingga *output* yang didapatkan yaitu: tren aplikasi sistem informasi, tren teknologi jaringan dan tren dunia digital saat ini.

4.11 Manajemen Resiko

Risiko adalah hasil dari setiap keputusan ekonomi karena ketidakpastian adalah kondisi manajemen yang tak terhindarkan. Aktivitas inovasi selalu melibatkan risiko, yang mencakup jumlah faktor yang konstan. Dampaknya terhadap hasil kegiatan tidak dapat diperhitungkan secara akurat sebelumnya. Memilih proyek tertentu, perlu untuk mengevaluasi efektivitas, ketidakpastian dan faktor risiko. [45]

Ide manajemen risiko pada awalnya diterapkan di pasar keuangan, tetapi sekarang kerangka kerja telah berkembang menjadi menjadi jauh lebih kompleks. Definisi risiko manajemen dapat diringkas sebagai serangkaian terkoordinasi aktivitas yang mengidentifikasi, menilai dan mengendalikan risiko, untuk meminimalkan dampak dari kedua peristiwa yang diramalkan dan tidak terduga pada organisasi [46]

Manajemen risiko perlu menawarkan pendekatan terpadu untuk evaluasi, pengendalian, dan pemantauan ketiga jenis risiko ini. Buku ini membahas komponen kunci dari manajemen risiko dan bagaimana penerapannya. Contoh disediakan yang menunjukkan manfaat manajemen risiko untuk organisasi baik di sektor publik dan swasta. Manajemen risiko juga memiliki peran penting dalam keberhasilan organisasi nirlaba seperti amal dan (misalnya) klub dan badan keanggotaan lainnya [47]. manajemen risiko telah menjadi tren penelitian yang berkembang yang mengarah pada permintaan untuk tinjauan menyeluruh terhadap perkembangan mutakhir ini. [48]

Dalam teori manajemen risiko, dua pendekatan dapat dibedakan: manajemen risiko tradisional dan ERM (Enterprise Risk Management). Manajemen risiko tradisional

didefinisikan sebagai “proses menciptakan dan mengimplementasikan solusi yang meminimalkan efek merugikan dari kerugian yang tidak disengaja pada suatu organisasi”. Pendekatan manajemen risiko ini ditujukan untuk: mengidentifikasi potensi kerugian dan mengeksplorasi kemungkinan berbagai strategi untuk membatasinya [49].

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang resmi berdiri pada 3 April 2009 [1]. Meskipun tergolong baru, kabupaten ini memiliki komitmen yang tinggi terhadap kualitas pemerintahannya. Berbagai hal diupayakan untuk menjaga kualitas dan stabilitas pemerintahan di wilayah tersebut. Salah satu upayanya adalah dengan mengembangkan serta menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara berkesinambungan guna mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau yang biasa dikenal dengan istilah *e-Government*. Melalui penerapan teknologi tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kemudahan, kecepatan dan transparansi layanan pemerintahan bagi masyarakat. Namun demikian, bagi Kabupaten Pringsewu hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk diwujudkan. Konsep dan persiapan yang matang dibutuhkan untuk hal tersebut, terutama terkait dengan penyiapan infrastruktur, sarana-prasarana, sumber daya manusia, dan budaya kerja.

Saat ini Kabupaten Pringsewu telah memiliki dokumen rencana penerapan *e-Government* yang konsepnya disusun sejak tahun 2017 silam. Hingga saat ini dokumen tersebut masih berlaku dan tetap menjadi acuan pengembangan TIK di kabupaten tersebut. Namun demikian, dalam implementasinya sering terjadi ketidaksesuaian antara apa yang direncanakan dengan kebutuhan yang terus berkembang dan semakin dinamis. Selain itu, rencana tersebut juga tidak memuat *time line* yang menjadi acuan waktu penerapan TIK di Kabupaten Pringsewu sebagaimana yang direncanakan. Oleh karenanya, untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut maka dibutuhkan perencanaan strategis yang detail, teruji, dan dikaji secara akademis.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018, manajemen risiko termasuk dalam lingkup manajemen SPBE, Manajemen resiko yang di atur dalam Perpres tersebut

bertujuan untuk menjaga keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko yang akan di temui dalam kegiatan implementasi SPBE. Dinas Kominfo Kabupaten Pringsewu merupakan organisasi pemerintah yang juga wajib melaksanakan dan menjalankan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik, saat ini Dinas Kominfo Kabupaten Pringsewu saat ini memiliki panduan manajemen risiko SPBE, yang di buat tidak mengacu pada konsep yang telah di kembangkan oleh para peneliti, Akibatnya, Dinas Kominfo Kabupaten Pringsewu identifikasi, analisis dan penanganan risiko SPBE yang berdampak pada tidak tercapainya sasaran dan tujuan secara efektif jika risiko terjadi. Karena itu peneliti mencoba memasukan beberapa teori dalam pengembangan manajemen resiko di Dinas Kominfo Kabupaten Pringsewu beberapa kerangka kerja, antara lain OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation), setelah proses analisis kemungkinan terjadi resiko maka selanjutnya akan di lakukan proses penilaian risiko digunakan metode FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) agar menghasilkan RPN (Risk Priority Number). RPN diperoleh berdasarkan perkalian 3 variabel faktor penilaian risiko, diantaranya Severity (besarnya dampak kegagalan) [50]. Di harapkan dengan menerapkan OCTAVE dan FMEA, Dinas Kominfo Kabupaten Pringsewu dapat lebih mudah dalam Menyusun Manajemen resiko dan meningkatkan efektifitas kendali terhadap resiko yang akan di hadapi.

4.12 Tools Manajemen Resiko Kabupaten Pringsewu

Kerangka Kerja Manajemen risiko adalah serangkaian konsep yang di gunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan manajemen resiko, kerangka ini terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk mengatasi meningkatkan kompleksitas lingkungan organisasi. RM adalah keuntungan yang sangat penting bagi organisasi, institusi dan industri karena meningkatnya globalisasi dan persyaratan peraturan yang berkembang [51]. Manajemen Resiko untuk TI dirancang untuk menyediakan struktur untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko di seluruh siklus hidup yang lengkap investasi di bidang IT [51]

Standar manajemen risiko digunakan untuk menilai berbagai informasi yang dihasilkan selama proses penerapan standar manajemen resiko dalam suatu organisasi .[52]

Secara umum, lima proses manajemen risiko dasar adalah: dimasukkan dan dianalisis dalam model ini, yaitu Risiko Identifikasi, Analisis Risiko, Klasifikasi Risiko, Mitigasi Risiko dan Pengendalian Risiko.[53].

Manajemen Resiko di buat dengan berbasis pengembangan berkelanjutan. [54]. Dengan memperhatikan tiga sumber risiko yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu ketika mencoba merancang dan memproduksi produk. Ketiga sumber risiko tersebut adalah: 1. Definisi input desain yang tidak lengkap dan/atau salah; 2. Penciptaan keluaran desain yang tidak memadai untuk memenuhi masukan desain; 3. Pembuatan produk yang tidak sesuai dengan desain [55]. Manajemen Resiko Sebagai standar untuk membantu instansi dalam melindungi keamanan aset informasi dan menjalankan keamanan informasi sistem manajemen [56]

Proyek Sistem Informasi menghadapi banyak risiko dan tantangan karena kompleksitas dan teknisnya. Paling umum proyek sistem informasi gagal mencapai tujuannya karena berbagai faktor termasuk manajemen risiko yang buruk. Meskipun perhatian dan penekanan terus-menerus pada pentingnya risiko manajemen selama pelaksanaan proyek, manajemen risiko praktiknya relatif rendah dan proses manajemen risiko telah belum dipraktikkan secara keseluruhan, Secara umum, lima proses manajemen risiko dasar adalah Identifikasi Resiko, Analisis Risiko, Klasifikasi Risiko, Mitigasi Risiko dan Pengendalian Risiko.[53]

3. FMEA

Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi mode kegagalan yang dapat menyebabkan kegagalan fungsi dan untuk menganalisis hubungan antara mode kegagalan. Modus kegagalan potensial dapat ditekan melalui langkah-langkah antisipatif berdasarkan prioritas. [57]. FMEA juga merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi potensi

kegagalan dalam sistem di mana "mode kegagalan", dan "analisis efek" mengacu pada dampak dari rincian hasil analisis yang di lakukan terhadap suatu proses dalam kerja sistem. [58].

4. Keuntungan FMEA

Prosedur FMEA adalah cara yang sangat efektif untuk mengevaluasi proses, layanan atau produk. FMEA juga sama pentingnya untuk mengungkapkan area yang membutuhkan perbaikan, serta memandu pengembangan sebuah proses yang baru. FMEA berisi cara yang logis dan terstruktur untuk mengidentifikasi area yang menjadi perhatian sekaligus mengurangi waktu dan biaya pengembangan. FMEA memiliki tujuannya untuk menerapkan proses dari satu produk atau layanan ke yang lain. FMEA juga efektif untuk mengidentifikasi cara meningkatkan area di mana kinerja mungkin tertinggal. salah satu manfaat paling penting adalah bagaimana FMEA memungkinkan identifikasi awal titik kegagalan tunggal dan masalah antarmuka sistem yang dapat menghambat keberhasilan dan berdampak pada keberlangsungan sistem. [59].

5. Langkah penerapan FMEA

FMEA adalah teknik analisis untuk mengidentifikasi dan menghilangkan potensi kegagalan, masalah, dan/atau kerusakan sistem (desain, proses, atau layanan), Tahapan utama dari metode FMEA adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi proses dan resiko yang mungkin terjadi jika terdapat sebuah ancaman
2. Mengukur Tingkat Keparahan (Severity) Severity dengan melakukan penilaian terhadap keseriusan dari efek yang ada akibat kegagalan sistem. apabila efek yang terjadi adalah efek yang kritis, maka nilai severity pun akan tinggi.
3. Mengukur Tingkat Kejadian (Occurance) Occurance yang di lakukan dengan menentukan nilai rating yang disesuaikan dengan frekuensi yang diperkirakan dan atau angka kumulatif dari kegagalan yang mungkin akan terjadi.
4. Menentukann nilai (Detection), Nilai detection di sesuaikan dengan pengendalian saat ini. Detection adalah proses mengukur level kemampuan untuk mengendalikan / mengontrol kegagalan yang dapat terjadi.

5. Menghitung Risk Priority Number (RPN) Nilai ini merupakan produk dari hasil perkalian tingkat keparahan, tingkat kejadian, dan tingkat deteksi. RPN menentukan prioritas dari kegagalan

$$RPN = Severity \times Occurrence \times Detection \quad (1)$$

Risiko yang memiliki RPN tertinggi harus menjadi prioritas untuk antisipasi, mitigasi, dan strategi risiko. Tabel I menunjukkan tingkat risiko dan skala risiko berdasarkan nilai RPN.

Tabel 1. Tingkat Resiko RPN

Risk Level	RPN Scale
Very low	$X < 20$
Low	$20 \leq X < 80$
Medium	$80 \leq X < 120$
High	$120 \leq X < 200$
Very high	$X > 200$

6. OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation)

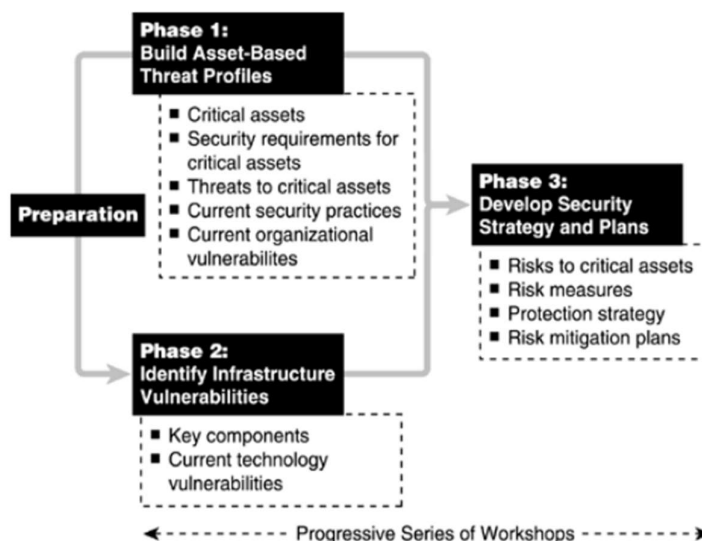
Metode OCTAVE di gunakan untuk mengidentifikasi risiko yang ada dalam organisasi dengan penilaian risiko yang dilakukan pada aset organisasi tersebut yang mungkin atau mungkin tidak terancam oleh keamanan data atau informasi yang dapat mempengaruhi kredibilitas secara umum [60]. Fase pertama dari manajemen risiko keamanan informasi adalah untuk menganalisis aset informasi organisasi untuk mengidentifikasi kondisi saat ini, ancaman dan, kerentanan, ini dapat dilakukan dengan penilaian kerentanan atau pengujian penetrasi. Hasil tahap pertama digunakan sebagai masukan pada tahap kedua

Mengidentifikasi kondisi saat ini adalah proses untuk menjelaskan kondisi yang menyebabkan ancaman dan kerentanan dapat digunakan oleh pihak lain yang tidak memiliki otentikasi dan otorisasi untuk melanggar keamanan informasi pada aset organisasi. Dokumen pendukung dalam meningkatkan risiko keamanan informasi

di perguruan tinggi seperti prosedur operasi standar, instruksi kerja, catatan, dan dokumen hukum lainnya harus dijelaskan pada kolom kondisi saat ini apakah dokumen tersebut sudah ada dan/atau sudah diterapkan. Jika dokumen-dokumen tersebut belum ada dan/atau belum dilaksanakan, maka rencana perbaikan dokumen tersebut harus ada atau dilaksanakan. Operasi, insiden, dan masalah yang terkait dengan risiko keamanan informasi yang terjadi dan/atau kemungkinan akan terjadi harus dijelaskan pada kolom kondisi saat ini sehingga dapat mengidentifikasi rencana perbaikan yang diperlukan. [61].

Tiga fase yang di perlukan dalam kerangka kerja octave adalah, Membangun Aset Berbasis Ancaman Profil, Identifikasi Infrastruktur Vulnerabilities dan Mengembangkan Strategi Keamanan dan Perencanaannya.

Dalam manajemen risiko terdapat beberapa kerangka kerja yang akan di terapkan peneliti dalam menentukan resiko yang di hadapi oleh Dinas Kominfo Kabupaten Pringsewu, dalam menemukan resiko dan mitigasinya maka peneliti menerapkan metode OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation) yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko keamanan informasi, tahapan yang akan di lakukan seperti yang tergambar dalam gambar 1. Sebagai berikut



Gambar 4.16. Metode Octave

Maka tahapan yang di lakukan antra lain

Tahap 1 Menentukan Aset Berdasarkan Profil Ancaman

1. Mendata aset kritis Aset kritis diperoleh dari pengumpulan data berdasarkan data dari Biro Aset Bidang perbendaharaan barang Kabupaten Pringsewu
2. Mengidentifikasi kebutuhan keamanan aset kritis Berdasarkan hasil dari Biro Aset Bidang perbendaharaan barang Kabupaten Pringsewu
3. Mengidentifikasi ancaman aset kritis Identifikasi ancaman terhadap aset kritis dilakukan dengan mengacu pada data yang diperoleh Biro Aset Bidang perbendaharaan barang dan dari analisi yang di lakukan di dinas Kominfo Kabupaten Pringsewu
4. Mendata keamanan yang sudah diterapkan di Dinas Kominfo Kabupaten Pringsewu
5. Mengidentifikasi kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu Proses identifikasi kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu dilakukan berdasarkan hasil analisis yang ada di Dinas Kominfo Pringsewu

Fase 2 Identifikasi Kelemahan Infrastruktur

1. Mengidentifikasi Komponen Penting Berdasarkan daftar data aset penting, persyaratan keamanan, dan ancaman yang ditangkap, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi komponen penting dari setiap aset penting.
2. Mengevaluasi kelemahan komponen kunci Evaluasi serta kelemahan masing masing elemen yang rentan terhadap ancaman

Fase 3 Mengembangkan Rencana dan Strategi

1. Identifikasi Risiko Proses identifikasi risiko dilakukan pada komponen-komponen utama yang berkaitan dengan aset penting Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu dan dapat mempengaruhi proses bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu. Identifikasi risiko ini didasarkan pada hasil identifikasi dan penilaian yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Melakukan Pengukuran Risiko Pengukuran risiko dilakukan menurut metode FMEA, berdasarkan daftar kemungkinan risiko yang telah disiapkan sebelumnya. Hasil penilaian risiko ini menunjukkan tingkat risiko yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu. Pengukuran risiko dengan metode FMEA didasarkan pada tiga komponen: keparahan, kejadian, dan deteksi. Kemudian nilai setiap elemen dikalikan untuk mendapatkan angka prioritas risiko nantinya. Risiko kemudian dikategorikan menurut tingkatannya.
3. Rencana Mitigasi Risiko Rencana mitigasi risiko dibuat untuk melindungi setiap komponen aset utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu dari kemungkinan risiko.

Tabel Manajemen Resiko

Berdasarkan Hasil pengumpulan data maka di dapatkan rincian aset kritis, selanjutnya akan di buat rincian resiko dan dampak yang akan terjadi, yang selanjutnya akan di definisi nilai FMEA berdasarkan analisis yang di lakukan :

Tabel 4.4. Tingkat Aset Kritis OCTAVE dan nilai RPN FMEA Dinas Kominfo Pringsewu

Aset	Aset Kritis	Ancaman / Resiko	Dampak	S	O	D	RPN	Sts
<i>Hardware</i>	Server Aplikasi	Kerusakan Perangkat	Sistem dan Aplikasi serta data tidak dapat di akses	8	5	7	280	VH
	Server Mirroring	Kerusakan Perangkat	Sistem dan Aplikasi serta data tidak dapat di akses	8	5	7	280	VH
	Server Database	Kerusakan Perangkat	Sistem dan Aplikasi serta data tidak dapat di akses	8	5	7	280	VH

Aset	Aset Kritis	Ancaman / Resiko	Dampak	S	O	D	RPN	Sts
	Server Mail	Kerusakan Perangkat	Sistem dan Aplikasi serta data tidak dapat di akses	8	5	7	280	VH
	Server SMS Gateway	Kerusakan Perangkat	Sistem dan Aplikasi serta data tidak dapat di akses	8	5	7	280	VH
	<i>Switch</i>	Kerusakan Perangkat	Sistem masih dapat di akses namun tidak dapat di gunakan secara maksimal	4	8	6	192	H
	<i>Manage switch</i>	Kerusakan Perangkat	Sistem masih dapat di akses namun tidak dapat di gunakan secara maksimal	4	8	6	192	H
	<i>Accesspoint</i>	Kerusakan Perangkat	Sistem masih dapat di akses namun tidak dapat di gunakan secara maksimal	4	8	6	192	H
	<i>Manage accesspoint</i>	Kerusakan Perangkat	Sistem masih dapat di akses namun tidak dapat di gunakan secara maksimal	4	8	6	192	H
	Kabel LAN	Kerusakan Perangkat	Sistem masih dapat di akses namun tidak dapat di gunakan secara maksimal	4	8	6	192	H

Aset	Aset Kritis	Ancaman / Resiko	Dampak	S	O	D	RPN	Sts
	UPS	Kerusakan Perangkat	Sistem masih dapat di akses namun tidak dapat di gunakan secara maksimal	4	8	6	192	H
	PC	Kerusakan Perangkat	Sistem masih dapat di akses namun tidak dapat di gunakan secara maksimal	4	7	6	168	H
	Printer	Kerusakan Perangkat	Tidak dapat mencetak dokumen	2	5	6	60	L
	<i>Core Switch</i>	Kerusakan Perangkat	Sistem masih dapat di akses namun tidak dapat di gunakan secara maksimal	4	8	6	192	H
	Proxy Server	Kerusakan Perangkat	Sistem masih dapat di akses namun tidak dapat di gunakan secara maksimal	3	5	6	90	M
	Thin Client Server	Kerusakan Perangkat	Sistem masih dapat di akses namun tidak dapat di gunakan secara maksimal		5	5	0	VL
<i>Software</i>	<i>OS microsoft</i>	OS Rusak / Failure	Sistem dan Aplikasi serta data tidak dapat di akses	8	6	5	240	VH
	<i>OS server</i>	OS Rusak /	Sistem dan	8	6	5	240	VH

Aset	Aset Kritis	Ancaman / Resiko	Dampak	S	O	D	RPN	Sts
		Failure	Aplikasi serta data tidak dapat di akses					
	Antivirus ESET	Software Rusak / Un Update / Software Corrupt	Sistem rentan terhadap virus	5	6	5	150	H
	Aplikasi Umum	Software Rusak / Un Update / Software Corrupt	Sistem dan Aplikasi serta data tidak dapat di akses	8	7	6	336	VH
	Aplikasi Khusus	Software Rusak / Un Update / Software Corrupt	Sistem dan Aplikasi serta data tidak dapat di akses	8	7	5	280	VH
	Aplikasi Database	Software Rusak / Un Update / Software Corrupt	Sistem dan Aplikasi serta data tidak dapat di akses	8	7	5	280	VH
<i>People</i>	Admin IT dan Jaringan	Pengetahuan yang kurang / Orang yang berganti	Sistem akan mudah terancam, perbaikan akan lambat dalam eksekusi dan menghambat kegiatan	8	3	4	96	M
	Admin Database	Pengetahuan yang kurang / Orang yang	Sistem akan mudah terancam, perbaikan akan	8	3	4	96	M

Aset	Aset Kritis	Ancaman / Resiko	Dampak	S	O	D	RPN	Sts
		berganti	lambat dalam eksekusi dan menghambat kegiatan					
	Admin Sistem	Pengetahuan yang kurang / Orang yang berganti	Sistem akan mudah terancam, perbaikan akan lambat dalam eksekusi dan menghambat kegiatan	8	3	4	96	M
	IT Support	Pengetahuan yang kurang / Orang yang berganti	Sistem akan mudah terancam, perbaikan akan lambat dalam eksekusi dan menghambat kegiatan	8	3	4	96	M
	Software Development	Pengetahuan yang kurang / Orang yang berganti	Sistem akan mudah terancam, perbaikan akan lambat dalam eksekusi dan menghambat kegiatan	8	3	5	120	H
	Analyst Programmer	Pengetahuan yang kurang / Orang yang berganti	Sistem akan mudah terancam, perbaikan akan lambat dalam eksekusi dan menghambat kegiatan	8	3	5	120	H
Data	Data Aplikasi	Data Rusak,	Sistem dan	8	5	5	200	H

Aset	Aset Kritis	Ancaman / Resiko	Dampak	S	O	D	RPN	Sts
	Umum	Data Hilang, Data diretas	Aplikasi serta data tidak dapat di akses					
	Data Aplikasi Khusus	Data Rusak, Data Hilang, Data diretas	Sistem dan Aplikasi serta data tidak dapat di akses	8	5	5	200	H
	Data Statistika	Data Rusak, Data Hilang, Data diretas	Sistem dan Aplikasi serta data tidak dapat di akses	8	5	5	200	H
	Data Aplikasi Pendamping	Data Rusak, Data Hilang, Data diretas	Sistem dan Aplikasi serta data tidak dapat di akses	8	5	5	200	H
	Data Statis / Portal Berita	Data Rusak, Data Hilang, Data diretas	Sistem dan Aplikasi serta data tidak dapat di akses	6	5	3	90	M
<i>Network</i>	Jaringan internet	Kerusakan Perangkat, Internet tidak terhubung	Sistem dan Aplikasi serta data tidak dapat di akses	8	6	6	288	VH
	Jaringan intranet	Kerusakan Perangkat, Interant tidak terhubung	Sistem dan Aplikasi serta data tidak dapat di akses	8	6	6	288	VH
<i>Procedure</i>	SOP (<i>Standart Operational Procedure</i>)	SOP tidak dilaksanakan, SOP tidak tersedia,	Prosedur kerja tidak terlaksana sebagaimana mestinya	7	4	5	140	H

Aset	Aset Kritis	Ancaman / Resiko	Dampak	S	O	D	RPN	Sts
		SOP tidak Update						

Dari hasil di atas analisis yang di tentukan terdapat beberapa hal yang menjadi ancaman tertinggi, tinggi dan medium antara lain, melakukan rencana dan strategi keamanan sesuai dengan daftar yang tertera pada tabel 3

Tabel 3. Rencana dan Strategi Keamanan

Kategori Aset	Very High	High	Medium	Low	Very Low
Hardware	Mengadakan Hardware Cadangan, Melaksanakan SOP keamanan, menerapkan mitigasi cepat ketika terjadi gangguan	Melaksanakan Mitigasi Dengan Cepat, menyediakan perangkat cadangan, memeriksa perangkat secara periodik	Melaksanakan Mitigasi, melakukan pengecekan berkala, menyediakan perangkat pengganti	Melaksanakan Mitigasi, Membuat anggaran untuk pergantian perangkat, pengecekan secara berkala	Melakukan pengecekan berkala, membuat anggaran tentatif untuk pergantian perangkat
Software	Backup Aplikasi, Membuat aplikasi mirror, melaksanakan mitigasi dengan cepat	Back up Aplikasi, Melaksanakan mitigasi, update aplikasi secara berkala	Melaksanakan mitigasi, media penyimpanan aplikasi cadangan	Update secara berkala	Penyediaan Software dalam bentuk instalasi

Kategori Aset	Very High	High	Medium	Low	Very Low
People	Mengadakan pelatihan, mengadakan rekrutment berkala, menerapkan KMS	Mengadakan pelatihan, menerapkan KMS, mempersiapkan tenaga cadangan	Menerapkan KMS, review pengetahuan	Menerapkan KMS	Mereview Pengetahuan
Data	Backup Data, Membuat Data mirror, melaksanakan mitigasi dengan cepat, Menyediakan Cloud data	Backup Data, melaksanakan mitigasi dengan cepat, Menyediakan Cloud data	Back up Data, dan me nyediakan Cloud data	Backup Data berkala	Backup Data
Network	Backup Perangkat, Meyediakan Perangkat pengganti dengan jumlah sama, melaksanakan mitigasi dengan cepat, Menyediakan tenaga kerja pengganti	Backup Perangkat, Meyediakan Perangkat pengganti dengan jumlah separuh kebutuhan, melaksanakan mitigasi dengan cepat, Menyediakan tenaga kerja pengganti	Menyedian perangkat pengganti, pengecekan secara berkala	Anggaran perangkat pengganti, pengecekan berkala	Anggaran perangkat pengganti setengah dari kebutuhan, pengecekan

Kategori Aset	Very High	High	Medium	Low	Very Low
Procedure	Menerapkan SOP dan Sistem Penjaminan Mutu Keamanan SI, audit secara berkala	Menerapkan SOP dan, audit secara berkala	Menerapkan SOP, dan review	Menjalankan SOP	Menyediakan SOP

Mitigasi risiko pada aset kritis TI dilakukan setelah diperoleh hasil dari perangkaan risiko yang sudah dilakukan pada tahapan sebelumnya, sehingga dilakukan kontrol objektif berdasarkan nilai RPN telah di buat untuk dilaksanakan selanjutnya.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan berdsarkan pengumpulan data dapat di lihat dan di petakan, asset asset yang menjadi tolak ukur kritis dalam resiko keamanan sistem informasi, dari hasil penelitian di dapatkan beberpa kesimpulan, Terdapat beberapa penyebab terjadinya risiko yang mengakibatkan dampak yang cukup besar atas berjalannya sistem dan aplikasi di kabupaten pringsewu, dampak yang paling signifikan terjadi pada perangkat keras atau hardware memiliki kerentanan sebesar 85%, yang terdiri dari status Sangat tinggi dan tinggi, selanjutnya kerentanan juga terjadi pada perangkat lunak, atau software sebesar 100% yang terdiri dari kerantanan dengan nilai tinggi dan sangat tinggi, selanjutnya adalah data dengan kerentanan sebesar 80% yang terdiri dari resiko tinggi.

Pada penelitian ini level risiko yang diperoleh lebih banyak pada very high dan high seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 2. Persentase Resiko Dinas Kominfo Pringsewi

Dengan di perolehnya grafik itu, maka di perlukan rencana dan mitigasi yang matang dan terukur, untuk dapat di laksanakan dan di implementasi, agar kemungkinan kegagalan sistem dapat di hindari.

4.13 Usulan Terhadap Organisasi dalam Kerangka SPBE

Langkah dalam melakukan perencanaan strategis di lakukan dengan melakukan hasil analisis SWOT antara lain

SWOT (*Strenght, Weaknesses, Oppurtunities, dan Threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT ini adalah hasil telaah dari isu-isu strategis pada dokumen kebijakan Kabupaten Pringsewu, seperti SK, Peraturan Gubernur maupun RPJMD sebagai bahan perancangan Strategis Sistem Informasi sebagai berikut. Dengan landasan tersebut maka di dapatkan potret strategi pengembangan perencanaan SI dan TI yang di susun dalam Tabel 2.

Tabel 4.5. Strategi IS / IT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu

No	Komponen	Kegiatan Strategi	Luaran Strategi	Tujuan Strategi
1	Tata Kelola	Membuat dan menetapkan Kebijakan-Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu Tentang Tata Kelola SPBE 	Meningkatkan Nilai dan kualitas tata Kelola SPBE Kabupaten Pringsewu

No	Komponen	Kegiatan Strategi	Luaran Strategi	Tujuan Strategi
		SPBE (Perbup/SK)	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Keputusan Bupati Pringsewu Tentang Tata Kelola SPBE • Rancangan Keputusan Bupati Pringsewu Tentang Tata Kelola SPBE • Rancangan Keputusan Bupati Pringsewu Tentang Tata tentang Pembentukan Tim Pengarah SPBE • Keputusan Bupati Pringsewu tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan SPBE 	
2	Tata Kelola	Membuat SOP yang merupakan turunan dari kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Integrasi Aplikasi • SOP Instalasi dan Registrasi Aplikasi • SOP Hosting dan Domain 	Meningkatkan Nilai dan kualitas tata Kelola SPBE Kabupaten Pringsewu

No	Komponen	Kegiatan Strategi	Luaran Strategi	Tujuan Strategi
			<ul style="list-style-type: none"> • SOP Pengelolaan Data Center • SOP Keamanan Sistem Informasi • SOP Pengelolaan Infrastruktur TIK 	
3	Tata Kelola	Membuat Peta Rencana SPBE Kabupaten Pringsewu Dinas Komunikasi dan Informatika	Peta Rencana dan Roadmap SPBE Kabupaten Pringsewu Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan Nilai dan kualitas tata Kelola SPBE Kabupaten Pringsewu
4	Manajemen	Membuat Arsitektur SPBE 6 Domain pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Arsitektur SPBE 6 Domain pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan Nilai dan kualitas Manajemen SPBE Kabupaten Pringsewu
5	Manajemen	Membentuk Tim Koordinasi (Pengawas dan Pelaksana) SPBE sesuai tupoksinya	Surat Keputusan Bupati Pringsewu tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan SPBE	Meningkatkan Nilai dan kualitas Manajemen SPBE Kabupaten Pringsewu

No	Komponen	Kegiatan Strategi	Luaran Strategi	Tujuan Strategi
6	Manajemen	Melakukan evaluasi berkala SPBE (update indeks SPBE)	Dilakukan pada setiap akhir Tahun 2022-2026 oleh Tim	Meningkatkan Nilai dan kualitas Manajemen SPBE Kabupaten Pringsewu
7	Infrastruktur	Melakukan optimalisasi pusat data/server room/DRC	Dilakukan sektoral oleh Perangkat Daerah yang mempunyai pusat data/server, namun belum terintegrasi ke dalam Server Dinas Kominfo Kabupaten Pringsewu	Meningkatkan Nilai dan kualitas Infrastruktur SPBE Kabupaten Pringsewu
8	Infrastruktur	Membangun jaringan intranet/ Metro/VPN/Ba ckbone FO, untuk Desa desa di kabupaten Pringsewu	Jaringan intranet sudah terbangun di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu	Meningkatkan Nilai dan kualitas Infrastruktur SPBE Kabupaten Pringsewu
9	Layanan	Membangun Sistem Penghubung/ Integrator	Layanan dan Portal API untuk interoperabilitas Aplikasi yang ada di Dinas Kominfo	Meningkatkan Nilai dan kualitas Layanan SPBE Kabupaten Pringsewu

No	Komponen	Kegiatan Strategi	Luaran Strategi	Tujuan Strategi
			Kabupaten Pringsewu	
10	Aplikasi	Integrasi Layanan Elektronik	integrasi Sistem dan Aplikasi yang di gunakan di kabupaten Pringsewu	Meningkatkan Nilai dan kualitas Aplikasi SPBE Kabupaten Pringsewu
11	Aplikasi	Membangun Portal Data	Aplikasi dan Sistem Portal Data dan Statistik Kabupaten Pringsewu	Meningkatkan Nilai dan kualitas Infrastruktur SPBE Kabupaten Pringsewu
12	Keamanan	Membentuk Sistem Keamanan Informasi (Indeks KAMI)/ SNI 27001	Keamanan Informasi berbasis KAMI dan SNI 27001 yang di gunakan di lingkup persandian dan keamanan data dan informasi	Meningkatkan Nilai dan kualitas Keamanan SPBE Kabupaten Pringsewu
13	Layanan	Teknologi Kecerdasan Buatan/ Datawarehouse dengan Data Analytic untuk mengambil keputusan/ Command Center	Sistem dan aplikasi dashboard, serta pengembangan Command Centre Kabupaten Pringsewu pada Dinas Kominfo	Meningkatkan Nilai dan kualitas Layanan SPBE Kabupaten Pringsewu

No	Komponen	Kegiatan Strategi	Luaran Strategi	Tujuan Strategi
14	Manajemen	Membentuk Kapasitas ASN dalam Digital Skill dan Digital Leadership	Pendidikan dan Pelatihan kapasitas ASN dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Nilai dan kualitas Manajemen SPBE Kabupaten Pringsewu yang menunjang peningkatan SPBE
15	Tata Kelola	Membentuk Forum Kolaborasi SPBE Antar Organisasi Perangkat Daerah	Terdapat Forum Kolaborasi SPBE Antar Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Nilai dan kualitas Tata kelola SPBE Kabupaten Pringsewu
16	Audit TIK	Membentuk SDM TIK yang berfungsi melakukan Audit TIK Secara Berkala	Tim Audit TIK Kabupaten Pringsewu	Meningkatkan Nilai dan kualitas Audit TIK SPBE Kabupaten Pringsewu
17	Layanan	Membangun Portal Pelayanan Publik	Peningkatan jumlah layanan publik yang dapat di akses oleh masyarakat	Meningkatkan Nilai dan kualitas Layanan SPBE Kabupaten Pringsewu
18	Aplikasi	Membangun Portal Administrasi Pemerintahan	Portal layanan seperti Disdukacopil, Samsat Online dan lainnya	Meningkatkan Nilai dan kualitas Aplikasi SPBE

No	Komponen	Kegiatan Strategi	Luaran Strategi	Tujuan Strategi
				Kabupaten Pringsewu
19	Audit TIK	Melakukan survey pengguna berkala (tingkat kepuasan dan koreksi)	Hasil Survey kepuasan pengguna pengguna aplikasi SPBE Kabupaten Pringsewu	Meningkatkan Nilai dan kualitas Audit TIK SPBE Kabupaten Pringsewu
20	Tata Kelola	Membuat Call Center Layanan	Dilakukan sektoral oleh beberapa Perangkat Daerah dan belum menyeluruh terintegrasi	Meningkatkan Nilai dan kualitas Tata Kelola SPBE Kabupaten Pringsewu

Usulan Terhadap Poin Indikator SPBE yang di susun oleh Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Pringsewu.

Tabel 4.5 Usulan Strategi IS.IT

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan	Melakukan FGD dan pelatihan penyusunan arsitektur SPBE Melakukan Penyusunan Arsitektur SPBE Analisa dan Reviu Terkait Arsitektur SPBE

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
		SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	Penyusunan Roadmap sesuai dengan Arsitektur SPBE dan RPJMD Reviu dan Evaluasi

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	Kebijakan Internal Manajemen Data yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Data pada IPPD Penyusunan Arsitektur Data Tingkat Daerah Kabupaten Pringsewu Perencanaan data induk dan data referensi Pengumpulan data induk oleh Bapedda Pemeriksaan data induk dan data referensi Penyebarluasan data induk oleh bapedda Pembaruan data induk dan data referensi Penyimpanan data pada pusat data nasional Perencanaan penyusunan kualitas data
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi	Identifikasi dan Reviu Kebijakan SPBE

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
		pada setiap proses penerapan SPBE.	
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	Pembangunan Aplikasi Data Terbuka Pengembangan Layanan Data Terbuka
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan	Penerapan Jaringan Intra Pemerintah via VPN (Virtual Private Network)

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
		<p>reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.</p>	
7	<p>Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah</p>	<p>Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reuiu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.</p>	<p>Review dan pengembangan kebijakan Implementasi dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah</p>

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	Penyusunan Dokumen Pedoman Keamanan Informasi SPBE Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi SPBE berdasarkan kategori risiko Melakukan pendataan seluruh data, informasi, aplikasi dan infrastruktur, melakukan identifikasi kerentanan dan ancaman aset SPBE, mengukur tingkat keamanan risiko Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE oleh Diskominfo Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan dan supervisi keamanan SPBE oleh Diskominfo

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	Kebijakan Internal Audit TIK yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	Audit Infrastruktur SPBE Pengumpulan berkas audit infrastruktur Pelaksanaan Audit Infrastruktur Audit Aplikasi SPBE Pengumpulan berkas audit aplikasi Pelaksanaan Audit aplikasi Audit Keamanan SPBE Pengumpulan berkas audit aplikasi Pelaksanaan Audit aplikasi
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	Identifikasi dan Reviu Kebijakan SPBE

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	Melakukan FGD dan pelatihan penyusunan arsitektur SPBE Melakukan Penyusunan Arsitektur SPBE Analisa dan Reviu Terkait Arsitektur SPBE
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.	Penyusunan Roadmap sesuai dengan Arsitektur SPBE dan RPJMD Reviu dan Evaluasi
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	Rencana dan Anggaran SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SPBE

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
		melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	Inovasi Proses Bisnis SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	Penyusunan Inovasi Proses Bisnis Analisis Reviu dan Perbaikan Proses Bisnis

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Pembangunan Aplikasi SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	<p>Aplikasi Umum</p> <p>Aplikasi Srikandi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerapan aplikasi srikandi <p>Aplikasi Khusus</p> <p>Aplikasi E-Presensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Aplikasi E-presensi - Integrasi data dan aplikasi SIK dan E-lapkin - Pengembangan Aplikasi E-presensi <p>Aplikasi E-Lapkin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Aplikasi E-lapkin - Integrasi data dan aplikasi SIK dan E-presensi - Pengembangan Aplikasi E-lapkin <p>Aplikasi Data Terbuka</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Aplikasi Data Terbuka - Pengembangan Layanan Data Terbuka <p>Aplikasi Portal SPBE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Aplikasi Portal SPBE - Pengembangan Layanan Portal SPBE - Integrasi dengan Layanan Lain

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Layanan Pusat Data yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	<p>Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Data pada IPPD</p> <p>Penyusunan Arsitektur Data Tingkat Daerah Kabupaten Pringsewu</p> <p>Perencanaan data induk dan data referensi</p> <p>Pengumpulan data induk oleh Bapedda</p> <p>Pemeriksaan data induk dan data referensi</p> <p>Penyebarluasan data induk oleh bapedda</p> <p>Pembaruan data induk dan data referensi</p> <p>Penyimpanan data pada pusat data nasional</p> <p>Perencanaan penyusunan kualitas data</p>

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	Sistem Penghubung Layanan Implementasi dan Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Jaringan Intra Pemerintah Penerapan Jaringan Intra Pemerintah via VPN (Virtual Private Network) Pusat Data Nasional Integrasi dengan Pusat Data Nasional
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	Sistem Penghubung Layanan Implementasi dan Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Jaringan Intra Pemerintah Penerapan Jaringan Intra Pemerintah via VPN (Virtual Private Network) Pusat Data Nasional Integrasi dengan Pusat Data Nasional

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
19	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	Kolaborasi Penerapan SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	Identifikasi dan Reviu Kolaborasi SPBE
20	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	Identifikasi dan Reviu Tim Koordinasi SPBE

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Penerapan Manajemen Risiko SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko SPBE Reviu dan Evaluasi Manajemen Risiko Implementasi Hasil Reviu
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	Penyusunan Dokumen Pedoman Keamanan Informasi SPBE Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi SPBE berdasarkan kategori risiko Melakukan pendataan seluruh data, informasi, aplikasi dan infrastruktur, melakukan identifikasi kerentanan dan ancaman aset SPBE, mengukur tingkat keamanan risiko Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE oleh Diskominfo Pelaksanaan sosialisasi,

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
			pelatihan, bimbingan dan supervisi keamanan SPBE oleh Diskominfo
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Penerapan Manajemen Data yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan revidi dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	<p>Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Data pada IPPD</p> <p>Penyusunan Arsitektur Data Tingkat Daerah Kabupaten Pringsewu</p> <p>Perencanaan data induk dan data referensi</p> <p>Pengumpulan data induk oleh Bapedda</p> <p>Pemeriksaan data induk dan data referensi</p> <p>Penyebarluasan data induk oleh bapedda</p> <p>Pembaruan data induk dan data referensi</p> <p>Penyimpanan data pada pusat data nasional</p> <p>Perencanaan penyusunan kualitas data</p>

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	Penerapan Manajemen Aset TIK yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	Mengumpulkan aset SPBE (data, informasi, aplikasi dan infrastruktur) Penyusunan dokumen perencanaan Aset TIK Penyusunan laporan pengadaan Aset TIK Penyusunan laporan atas penghapusan Aset TIK
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan TIK Diskominfo Penyusunan Peta Jabatan Diskominfo Rencana atau Laporan Pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan TIK Diskominfo Analisis kebutuhan pelatihan bagi Pejabat TIK

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	Penerapan Manajemen Pengetahuan yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	Penyusunan dokumen pedoman manajemen pengetahuan penyusunan dokumen manajemen pengetahuan SPBE Evaluasi Reviu, dan Implementasi dokumen manajemen pengetahuan
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	Penerapan Manajemen Perubahan yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	Penyusunan Log Manajemen Perubahan pada unit kerja Pusat data dan Informasi Penyusunan SOP Manajemen Perubahan SPBE

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Penerapan Manajemen Layanan SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	Identifikasi dan Reviu Tim Manajemen Layanan SPBE
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	Audit Infrastruktur SPBE Pengumpulan berkas audit infrastruktur Pelaksanaan Audit Infrastruktur Audit Aplikasi SPBE Pengumpulan berkas audit aplikasi Pelaksanaan Audit aplikasi Audit Keamanan SPBE Pengumpulan berkas audit aplikasi Pelaksanaan Audit aplikasi

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	Audit Infrastruktur SPBE Pengumpulan berkas audit infrastruktur Pelaksanaan Audit Infrastruktur Audit Aplikasi SPBE Pengumpulan berkas audit aplikasi Pelaksanaan Audit aplikasi Audit Keamanan SPBE Pengumpulan berkas audit aplikasi Pelaksanaan Audit aplikasi
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	Penyusunan Dokumen Pedoman Keamanan Informasi SPBE Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi SPBE berdasarkan kategori risiko Melakukan pendataan seluruh data, informasi, aplikasi dan infrastruktur, melakukan identifikasi kerentanan dan ancaman aset SPBE, mengukur tingkat keamanan risiko Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE oleh Diskominfo

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
			Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan dan supervisi keamanan SPBE oleh Diskominfo
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	Layanan Perencanaan yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penerapan SPBE dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses penerapan SPBE.	Penyediaan Platform Layanan Perizinan Online Penyediaan Platform Layanan Kepegawaian Online Penyediaan Platform pelayanan dan pengaduan online Penyediaan Platform pelayanan Helpdesk

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	Layanan Penganggaran diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain	Pengembangan layanan Rencana Kerja Anggaran SPBE
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	Layanan Keuangan diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain	Penyediaan Platform Layanan Perizinan Online Penyediaan Platform Layanan Kepegawaian Online Penyediaan Platform pelayanan dan pengaduan online Penyediaan Platform pelayanan Helpdesk
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain	Identifikasi dan Reviu Aplikasi LPSE

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	Layanan Kepegawaian diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain	Layanan Kepegawaian (E-presensi) Penerapan Sistem E-presensi Pengembangan Layanan E-presensi Integrasi Layanan E-presensi, E-lapkin, dan SIK Layanan Akuntabilitas Kinerja (E-lapkin) Penerapan Sistem E-lapkin Pengembangan Layanan E-lapkin Integrasi Layanan E-lapkin, E-presensi, dan SIK
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	Layanan Kearsipan Dinamis diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain	Identifikasi dan Reviu Aplikasi Manajemen Arsip Elektronik
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain	Mengumpulkan aset SPBE (data, informasi, aplikasi dan infrastruktur) Penyusunan dokumen perencanaan Aset TIK Penyusunan laporan pengadaan Aset TIK Penyusunan laporan atas penghapusan Aset TIK

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain	Identifikasi dan Reviu Pengawasan Internal Pemerintah
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain	Layanan Kepegawaian (E-presensi) Penerapan Sistem E-presensi Pengembangan Layanan E-presensi Integrasi Layanan E-presensi, E-lapkin, dan SIK Layanan Akuntabilitas Kinerja (E-lapkin) Penerapan Sistem E-lapkin Pengembangan Layanan E-lapkin Integrasi Layanan E-lapkin, E-presensi, dan SIK

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	Layanan Kinerja Pegawai diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain	Layanan Kepegawaian (E-presensi) Penerapan Sistem E-presensi Pengembangan Layanan E-presensi Integrasi Layanan E-presensi, E-lapkin, dan SIK Layanan Akuntabilitas Kinerja (E-lapkin) Penerapan Sistem E-lapkin Pengembangan Layanan E-lapkin Integrasi Layanan E-lapkin, E-presensi, dan SIK
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain	Identifikasi dan Reviu Layanan Pengaduan Publik

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	Layanan Data Terbuka diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain	Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Data pada IPPD Penyusunan Arsitektur Data Tingkat Daerah Kabupaten Pringsewu Perencanaan data induk dan data referensi Pengumpulan data induk oleh Bapedda Pemeriksaan data induk dan data referensi Penyebarluasan data induk oleh bapedda Pembaruan data induk dan data referensi Penyimpanan data pada pusat data nasional Perencanaan penyusunan kualitas data
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain	Review Aplikasi dan Pengembangan

No.	Indikator	Sasaran dan Tujuan Peningkatan	Strategi Pencapaian
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	Layanan Publik Sektor 1 diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain	Review Aplikasi dan Pengembangan
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	Layanan Publik Sektor 2 diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain	Review Aplikasi dan Pengembangan
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	Layanan Publik Sektor 3 diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain	Review Aplikasi dan Pengembangan

4.14 Roadmap

Roadmap SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Roadmap SPBE Kabupaten Pringsewu yang memuat tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan dan audit teknologi;

A. Roadmap Kebijakan

Roadmap kebijakan SPBE adalah sebagai berikut:

1. Program kebijakan internal terkait tata kelola SPBE
2. Penyempurnaan Perbup SPBE

B. Tata Kelola SPBE

Tata kelola SPBE harus mengacu tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan memiliki empat pilar utama yaitu koordinasi, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Koordinasi mengandung maksud pengelolaan pemerintahan harus terkoordinasi dimana terdapat kerjasama dan koordinasi yang baik antar perangkat daerah. Transparansi mengandung maksud pemerintahan harus transparan. Partisipasi mengandung maksud semua stakeholder atau shareholder harus berpartisipasi dalam pemerintahan. Akuntabel memiliki maksud pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan tersebut, perlu dibentuk tim koordinasi SPBE Kabupaten Pringsewu. Tim koordinasi ini selanjutnya menjadi sekretariat SPBE Kabupaten Pringsewu. Roadmap tata kelola SPBE adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Kebijakan SPBE Kabupaten Pringsewu.
2. Arsitektur SPBE.
3. Roadmap SPBE.
4. Perencanaan dan Penganggaran SPBE.
5. Penerapan Transformasi Proses Bisnis berbasis Elektronik.

C. Roadmap Manajemen SPBE

Manajemen SPBE merupakan inti dari pengelolaan SPBE setelah dibangun. Manajemen SPBE meliputi manajemen layanan, perubahan, risiko, data, pengetahuan, sumber daya manusia dan aset teknologi informasi. Dalam tata kelola ini terdapat leading sektor serta anggota spesifik yang memiliki tanggungjawab manajemen yang lebih besar daripada OPD yang dirujuk secara umum.

Roadmap tata kelola SPBE adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko
2. Manajemen Keamanan Informasi
3. Manajemen Data
4. Manajemen Aset
5. Manajemen SDM

6. Manajemen Pengetahuan
7. Manajemen Perubahan
8. Manajemen Layanan

D. Roadmap Layanan SPBE

Peta layanan SPBE di Kabupaten Pringsewu menyangkut layanan administrasi dan layanan publik. Layanan administrasi menyangkut kebutuhan administrasi oleh publik, badan usaha dan pemerintahan. Sedangkan layanan publik menyangkut kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan layanan pemerintah.

Peta rencana layanan SPBE adalah sebagai berikut:

1. Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik
 - Layanan Kepegawaian E-Presensi
 - Layanan Akuntabilitas Kinerja E-Lapkin
 - Layanan Data Terbuka
 - Layanan Portal SPBE
2. Layanan Publik Berbasis Elektronik
 - Layanan Kependudukan dan Pencatataan Sipil
 - Layanan Kesehatan

E. Roadmap Infrastruktur SPBE

Peta rencana infrastruktur SPBE adalah sebagai berikut:

1. Implementasi dan Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
2. Penerapan Jaringan Intra Pemerintah via VPN (Virtual Private Network);
3. Integrasi dengan Pusat Data Nasional

F. Peta Rencana Aplikasi SPBE

Peta rencana aplikasi SPBE meliputi aplikasi yang dikembangkan pada layanan-layanan yang direncanakan untuk dikembangkan pada rencana SPBE Kabupaten Pringsewu. Peta rencana aplikasi SPBE ini juga terbagi atas jenjang penanggungjawab aplikasi tersebut. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Pringsewu melakukan integrasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat dalam operasionalisasi aplikasi sistem informasi tersebut.

Peta rencana aplikasi SPBE adalah sebaga berikut:

1. Penerapan aplikasi Srikandi;
2. Pembangunan aplikasi E-presensi
3. Integrasi data dan aplikasi SIK dan E-lapkin
4. Pengembangan Aplikasi E-presensi
5. Pengembangan aplikasi E-Presensi
6. Integrasi data dan aplikasi SIK dan E-presensi
7. Pengembangan aplikasi E-Lapkin
8. Pembangunan Aplikasi data Terbuka
9. Pengembangan Layanan Data Terbuka
10. Pembangunan Aplikasi Portal SPBE
11. Pengembangan Aplikasi Portal SPBE
12. Integrasi dengan Layanan Lain

G. Peta Rencana Keamanan SPBE

Peta rencana keamanan SPBE meliputi kemandirian hardware, keamanan software, keamanan data dan keamanan dari server secara khusus.

Peta rencana kemandirian SPBE adalah sebaga berikut:

1. Penerapan Keamanan Informasi Untuk Layanan SPBE
2. Pembentukan CSIRT (Penanganan Insiden Siber) Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi;
3. Konsultasi dan Evaluasi keamanan siber SPBE;

H. Peta Rencana Audit Teknologi SPBE

Audit Teknologi SPBE yang berkelanjutan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting. Audit harus dilakukan secara berkala untuk menjamin terpenuhinya berbagai prinsip SPBE seperti efektifitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan yang tinggi. Audit dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Audit juga harus mengacu pada standard audit sistem informasi yang berlaku secara internasional. Dengan demikian, tim audit internal harus sudah mendapatkan sertifikasi dari lembaga resmi dalam konteks audit sistem informasi.

Peta rencana keamanan SPBE adalah sebagai berikut:

1. Audit Infrastruktur;
 2. Audit Aplikasi SPBE;
 3. Audit Keamanan SPBE;
- I. Tabel Peta Rencana Implementasi Rencana Strategis IT / IS sesuai standar SPBE

No	Project/Activities	PIC	Baseline	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK								
Indikator	Jumlah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik							
INISIATIF STRATEGIS :								
1	Kebijakan SPBE							
	A	Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE		Ada				
		Penyempurnaan Perbup SPBE	Kominfo	√	√	√	√	√
2	Tata Kelola							
	A	Penguatan Kebijakan SPBE Kabupaten Pringsewu						
		Pembuatan Peraturan Terkait Kebijakan SPBE Kab. Pringsewu		Sudah Reviu				
		Identifikasi dan Reviu - Kebijakan SPBE	Kominfo	√	√	√	√	√
	B	Arsitektur SPBE						

No	Project/Activities	PIC	Baseline	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK								
			Penyusunan Arsitektur SPBE		Ada			
			Melakukan FGD dan pelatihan - penyusunan arsitektur SPBE	Organisasi, Bappedda, Inspektorat dan Kominfo	√			
			Melakukan Penyusunan - Arsitektur SPBE	Organisasi, Bappedda, Inspektorat dan Kominfo	√	√	√	√
			Analisa dan Reviu Terkait - Arsitektur SPBE	Organisasi, Bappedda, Inspektorat dan Kominfo	√	√	√	√
	C		Roadmap SPBE					
			Penyusunan Roadmap SPBE		Ada			
			Penyusunan Roadmap sesuai dengan - Arsitektur SPBE dan RPJMD	Organisasi, dan Kominfo	√	√	√	√
			Reviu dan - Evaluasi	Organisasi, dan Kominfo	√	√	√	√
	D		Perencanaan dan Penganggaran SPBE					

No	Project/Activities	PIC	Baseline		Target				
			2022	2023	2024	2025	2026		
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK									
			Perencanaan Penganggaran SPBE		Ada				
			Penyusunan Rencana Kerja - Anggaran SPBE	Bapedda, BPKAD, dan Kominfo	√	√			
	E		Penerapan Transformasi Proses Bisnis berbasis Elektronik						
			Penyusunan Inovasi Proses Bisnis		Ada				
			Penyusunan Inovasi Proses Bisnis	Organisasi, Kominfo	√	√			
			Analisis Reviu dan Perbaikan Proses Bisnis	Organisasi, Kominfo	√	√	√	√	√
3									
	A		Penerapan Manajemen SPBE						
			Manajemen Risiko						
			Penyusunan Dokumen - Manajemen Risiko SPBE	Inspektorat, Kominfo	√	√			
			Reviu dan Evaluasi	Inspektorat, Kominfo	√	√	√	√	√

No	Project/Activities	PIC	Baseline	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK								
			Manajemen Risiko					
			Implementasi - Hasil Reviu	Inspektorat, Kominfo	√	√	√	√
	B		Manajemen Keamanan Informasi					
			Penyusunan Dokumen Pedoman - Keamanan Informasi SPBE	Kominfo	√	√		
			Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi - informasi SPBE berbadarkan kateori risiko	Kominfo	√	√		
			Melakukan pendataan seluruh data, informasi, aplikasi dan - infrastruktur, melakukan identifikasi kerentanan dan ancaman aset	Kominfo	√	√	√	√

No	Project/Activities	PIC	Baseline	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK								
			SPBE, mengukur tingkat keamanan risiko					
			Penyusunan standar teknis dan SOP - keamanan SPBE oleh Diskominfo	Kominfo	√	√	√	√
			Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan dan - supervisi keamanan SPBE oleh Diskominfo	Kominfo	√	√	√	√
	C		Manajemen Data					
			Penyusunan dokumen pedoman - Manajemen Data pada IPPD	Bapedda , Kominfo	√			
			Penyusunan Arsitektur Data - Tingkat Daerah	Bapedda, Kominfo	√	√		

No	Project/Activities			PIC	Baseline	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK										
				Kabupaten Pringsewu						
			-	Perencanaan data induk dan data referensi	Bapedda, Kominfo	√	√			
			-	Pengumpulan data induk oleh Bapedda	Bapedda, Kominfo	√	√	√	√	√
			-	Pemeriksaan data induk dan data referensi	Bapedda, Kominfo	√	√	√	√	√
			-	Penyebarluasan data induk oleh bapedda	Bapedda, Kominfo	√	√	√	√	√
			-	Pembaruan data induk dan data referensi	Bapedda, Kominfo	√	√	√	√	√
			-	Penyimpanan data pada pusat data nasional	Bapedda, Kominfo	√	√	√	√	√
			-	Perencanaan penyusunan kualitas data	Bapedda, Kominfo	√	√	√	√	√
	D	Manajemen Aset								
			-	Mengumpulkan aset SPBE (data, informasi, aplikasi dan infrastruktur)	BPKAD, Kominfo	√	√			

No	Project/Activities	PIC	Baseline	Target					
			2022	2023	2024	2025	2026		
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK									
			Penyusunan dokumen perencanaan Aset TIK	BPKAD, Kominfo	√	√	√	√	√
			Penyusunan laporan pengadaan Aset TIK	BPKAD, Kominfo	√	√	√	√	√
			Penyusunan laporan atas penghapusan Aset TIK	BPKAD, Kominfo	√	√	√	√	√
	E		Manajemen SDM						
			Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan TIK	Diskominfo	√	√			
			Penyusunan Peta Jabatan	Diskominfo	√	√			
			Rencana atau Laporan Pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan TIK	Diskominfo	√	√	√	√	√

No	Project/Activities	PIC	Baseline	Target					
			2022	2023	2024	2025	2026		
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK									
			- Analisis kebutuhan pelatihan bagi Pejabat TIK	Diskominfo	√	√	√	√	√
	F		Manajemen Pengetahuan						
			- Penyusunan dokumen pedoman manajemen pengetahuan	Diskominfo	√	√			
			- penyusunan dokumen manajemen pengetahuan SPBE	Diskominfo	√	√	√	√	√
			- Evaluasi Reviu, dan Implementasi dokumen manajemen pengetahuan	Diskominfo	√	√	√	√	√
	G		Manajemen Perubahan						
			- Penyusunan Log Manajemen Perubahan pada unit kerja Pusat data dan Informasi	Diskominfo	√	√	√	√	√

No	Project/Activities			PIC	Baseline	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK										
			Penyusunan SOP Manajemen Perubahan SPBE	Diskominfo	√	√	√	√	√	√
	H	Manajemen Layanan								
			Penyediaan Platform Layanan Perizinan Online	Diskominfo	√	√	√	√	√	√
			Penyediaan Platform Layanan Kepegawaian Online	Diskominfo	√	√	√	√	√	√
			Penyediaan Platform pelayanan dan pengaduan online	Diskominfo	√	√	√	√	√	√
			Penyediaan Platform pelayanan Helpdesk	Diskominfo	√	√	√	√	√	√
4	Layanan									
	A	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik								

No	Project/Activities	PIC	Baseline	Target					
			2022	2023	2024	2025	2026		
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK									
			Layanan Kepegawaian (E-presensi)						
			Penerapan Sistem E-presensi	Diskominfo, BPKAD	√	√	√	√	√
			Pengembangan Layanan E-presensi	Diskominfo, BPKAD	√	√	√	√	√
			Integrasi Layanan E-presensi, E-lapkin, dan SIK	Diskominfo, BPKAD	√	√	√	√	√
			Layanan Akuntabilitas Kinerja (E-lapkin)						
			Penerapan Sistem E-lapkin	Diskominfo, BPKAD	√	√	√	√	√
			Pengembangan Layanan E-lapkin	Diskominfo, BPKAD	√	√	√	√	√
			Integrasi Layanan E-lapkin, E-presensi, dan SIK	Diskominfo, BPKAD	√	√	√	√	√
			Layanan Data Terbuka						

No	Project/Activities			PIC	Baseline	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK										
			Pengembangan Layanan Data Terbuka	Diskominfo	√	√	√	√	√	√
			Layanan Portal SPBE							
			Pengembangan Layanan Portal SPBE	Diskominfo	√	√	√	√	√	√
			Integrasi dengan Layanan Lain	Diskominfo	√	√	√	√	√	√
	B	Layanan Publik Berbasis Elektronik								
			Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
			Pengembangan Layanan Sewuati Dukcapil	Disdukcapil, Diskominfo	√	√	√	√	√	√
			Layanan Kesehatan							
			Pengembangan Layanan SI RSUD	Dinkes, Diskominfo	√	√	√	√	√	√
5	Aplikasi									
	A	Aplikasi Umum								
			Aplikasi Srikandi							

No	Project/Activities			PIC	Baseline	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK										
			-	Penerapan aplikasi srikandi	Diskominfo, Anri, Perpustakaan	√	√	√	√	√
	B	Aplikasi Khusus								
		Aplikasi E-Presensi								
			-	Pembangunan Aplikasi E-presensi	Diskominfo	√	√			
			-	Integrasi data dan aplikasi SIK dan E-lapkin	Diskominfo	√	√			
			-	Pengembangan Aplikasi E-presensi	Diskominfo	√	√	√	√	√
		Aplikasi E-Lapkin								
			-	Pembangunan Aplikasi E-lapkin	Diskominfo	√	√			
			-	Integrasi data dan aplikasi SIK dan E-presensi	Diskominfo	√	√			
			-	Pengembangan Aplikasi E-lapkin	Diskominfo	√	√	√	√	√
		Aplikasi Data Terbuka								

No	Project/Activities			PIC	Baseline	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK										
			-	Pembangunan Aplikasi Data Terbuka	Diskominfo					
			-	Pengembangan Layanan Data Terbuka	Diskominfo	√	√	√	√	√
		Aplikasi Portal SPBE								
			-	Pembangunan Aplikasi Portal SPBE	Diskominfo	√	√	√	√	√
			-	Pengembangan Layanan Portal SPBE	Diskominfo	√	√	√	√	√
			-	Integrasi dengan Layanan Lain	Diskominfo					
5	Infrastruktur									
	A	Sistem Penghubung Layanan								
			-	Implementasi dan Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Diskominfo	√	√	√	√	√
	B	Jaringan Intra Pemerintah								

No	Project/Activities			PIC	Baseline	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK										
			Penerapan Jaringan Intra Pemerintah via - VPN (Virtual Private Network)	Diskominfo	√	√	√	√	√	√
	C	Pusat Data Nasional								
			Integrasi dengan Pusat - Data Nasional	Diskominfo	√	√	√	√	√	√
6	Keamanan									
	A	Penerapan Kemanan Informasi Untuk Layanan SPBE								
			Penerapan Kemanan Informasi pada - Infrastruktur Untuk Layanan SPBE	Diskominfo	√	√	√			
	B	Penerapan SCIRT								
			Pembentukan CSIRT (Penanganan Insiden Siber) - Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi	Diskominfo		√	√			
	C	Konsultasi dan Evaluasi								

No	Project/Activities			PIC	Baseline	Target				
					2022	2023	2024	2025	2026	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK										
				Konsultasi dan Evaluasi - keamanan siber SPBE	Diskominfo	√	√	√		
7	Audit TIK									
	A	Audit TIK								
				Audit Infrastruktur SPBE						
				Pengumpulan berkas audit - infrastruktur	Inspektorat, Diskominfo		√	√	√	√
				Pelaksanaan Audit - Infrastruktur	Inspektorat, Diskominfo		√	√	√	√
	B	Audit Aplikasi SPBE								
				Pengumpulan berkas audit - aplikasi	Inspektorat, Diskominfo		√	√	√	√
				Pelaksanaan - Audit aplikasi	Inspektorat, Diskominfo		√	√	√	√
	C	Audit Keamanan SPBE								
				Pengumpulan berkas audit - aplikasi	Inspektorat, Diskominfo		√	√	√	√
				Pelaksanaan - Audit aplikasi	Inspektorat, Diskominfo		√	√	√	√